



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK**

JALAN ADIBAI KM. 6,5 SUMBERKER SAMOFA BIAK NUMFOR PAPUA
TELEPON (0981) 8211818 FAKSIMILE (0981) 8211818
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.biak@kkp.go.id

Nomor : B.240/PSDKPSta.8/TU.140/II/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKj)
Tahun 2024

24 Januari 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
di Jakarta

Dalam rangka pemenuhan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas UPT Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Biak,

Mochamad Erwin



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

STASIUN PSDKP BIAK



PSDKP.BIAK@KKP.GO.ID



[HTTPS:KKP.GO.ID/DJPSDKP/STASIUNBIAK](https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak)



(0981) 8211818

2024

LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA

STASIUN PSDKP BIAK
TAHUN 2024



STASIUN PENGAWASAN

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

Diterbitkan Oleh

Stasiun Pengawasan SDKP Biak 2024

Penyusun:

Tim Penyusun Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak 2024

STASIUN **PSDKP** BIAK

Jalan Adibai km. 6,5 Sumberker Distrik Samofa

Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98156

Telp.(0981) 8211818

Pos Elektronik :psdkp.biak@kkp.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
PROFIL PIMPINAN	viii
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP	2
1.4 Data Umum Organisasi.....	5
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	7
II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.....	9
2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	17
3.2 Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketetapan.....	23
3.3 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	27
3.4 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	32
3.5 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	36
3.6 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas ..	41
3.7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	43
3.8 Realisasi Anggaran	67
3.9 Efisiensi.....	68
VI. Penutup	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Rekomendasi	71
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024	11
Tabel 2. Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024	15
Tabel 3. Efisiensi Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	17
Tabel 4. Efisiensi Sasaran terselenggaranya operasi armada yang efektif.....	18
Tabel 5. Capaian faktor perhitungan indeks operasi kapal pengawas	19
Tabel 6. Capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	19
Tabel 7. Capaian faktor perhitungan indeks operasi speedboat pengawas	21
Tabel 8. Capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas.....	21
Tabel 9. Capaian persentase pemenuhan logistik kapal pengawas	22
Tabel 10. Capaian IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	23
Tabel 11. Efisiensi Sasaran Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketetapan.....	24
Tabel 12. Capaian IKU Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan ..	24
Tabel 13. Capaian IKU Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	26
Tabel 14. Efisiensi Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	28
Tabel 15. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan	28
Tabel 16. Capaian output pengawasan sumber daya kelautan.....	30
Tabel 17. Efisiensi Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	33
Tabel 18. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan.....	33
Tabel 19. Rekapitulasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan.....	34
Tabel 20. Efisiensi Sasaran Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	36
Tabel 21. Sasaran terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas.....	37
Tabel 22. Capaian IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	37
Tabel 23. Sanksi administratif yang ditetapkan	38
Tabel 24. Capaian IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	40
Tabel 25. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	40
Tabel 26. Efisiensi Sasaran Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	41
Tabel 27. Sasaran terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	42
Tabel 28. Efisiensi Sasaran Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP.....	43
Tabel 29. Sasaran tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.....	44

Tabel 30. Capaian IKM Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP	46
Tabel 31. Penilaian Unsur Zona Integritas Stasiun PSDKP Baik Tahun 2024.....	47
Tabel 32. Capaian IKM Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak.....	48
Tabel 33. Capaian IKM Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Biak	50
Tabel 34. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak.....	51
Tabel 35. Capaian IKM Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak	52
Tabel 36. Capaian IKM Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak.....	53
Tabel 37. Capaian IKM Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	55
Tabel 16. Rekap Nilai Lomba Inovasi Tahun 2024.....	56
Tabel 38. Capaian IKM Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Biak.....	56
Tabel 39. Capaian IKM Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Biak	57
Tabel 40. Capaian IKM Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Biak	59
Tabel 41. Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak.....	60
Tabel 17. Nilai Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Biak.....	60
Tabel 42. Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak	62
Tabel 18. Nilai PBJ lingkup Stasiun PSDKP Biak.....	62
Tabel 43. Capaian IKM Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Biak.....	64
Tabel 44. Capaian IKM Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	65
Tabel 45. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Kinerja 2020 s.d Tahun 2024	vii
Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Biak	6
Gambar 3. Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d. 2024	15
Gambar 4. Perbandingan kinerja operasi kapal pengawas	19
Gambar 5. Perbandingan kinerja operasi speedboat pengawas).....	22
Gambar 6. Perbandingan capaian pemenuhan logistik	23
Gambar 7. Perbandingan capaian sarana dan prasarana yang diselesaikan	25
Gambar 8. Perbandingan capaian sarana dan prasarana yang diselesaikan	26
Gambar 9. Perbandingan capaian di level unit kerja (nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan)	29
Gambar 10. Perbandingan capaian di level unit kerja (Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan)	34
Gambar 11. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan)	39
Gambar 12. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan)	41
Gambar 13. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan)	43
Gambar 14. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (ZI)	48
Gambar 15. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MR)	49
Gambar 16. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Kearsipan)	50
Gambar 17. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IP ASN)	51
Gambar 18. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (SAKIP)	52
Gambar 19. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Rekomendasi Hasil Pengawasan)	54
Gambar 20. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Implementasi Budaya Kerja)	55
Gambar 21. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Inovasi)	56
Gambar 22. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IKM)	58
Gambar 23. Capaian per komponen penilaian IK Manajemen Pengetahuan	59
Gambar 24. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MP)	59
Gambar 24. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Pengelolaan BMN)	61
Gambar 24. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Pengelolaan PBJ)	63
Gambar 25. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Capaian IKPA)	65
Gambar 26. NKPA Stasiun PSDKP Biak	66
Gambar 27. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Capaian NKPA)	66
Gambar 28. Kurva Realisasi Anggaran Bulan Januari s/d Desember 2024	67

KATA PENGANTAR

Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak adalah salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas mengawasi perairan WPP 717 dan daratan, mencakup wilayah Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta sebagian Provinsi Papua Barat.

Sejak tahun 2021, pelaksanaan tugas pengawasan mulai berfokus pada tingkat risiko yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan berbasis risiko ini merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dalam praktiknya, semakin tinggi risiko suatu pemanfaatan, semakin sering aktivitas tersebut diawasi. Pada tahun ketiga pengawasan berbasis risiko, Stasiun PSDKP Biak terus bertransformasi untuk meningkatkan performa organisasi. Kinerja pelaksanaan tugas Stasiun PSDKP Biak dapat dilihat dalam Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran pertanggungjawaban atas upaya Stasiun PSDKP Biak dalam pemenuhan target kinerja dan penggunaan sumber daya. LKj disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai landasan penyusunan laporan ini, digunakan Rencana Strategis Stasiun PSDKP Biak Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang menyajikan analisis antara target dan realisasi atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM). Pada awal Tahun 2024, Stasiun PSDKP Biak memiliki 7 sasaran kegiatan dengan 10 IKU dan 14 IKM.

Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien. Kami menyadari bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak adalah visi yang harus dicapai bersama untuk bangsa Indonesia.

Biak Numfor, 24 Januari 2025

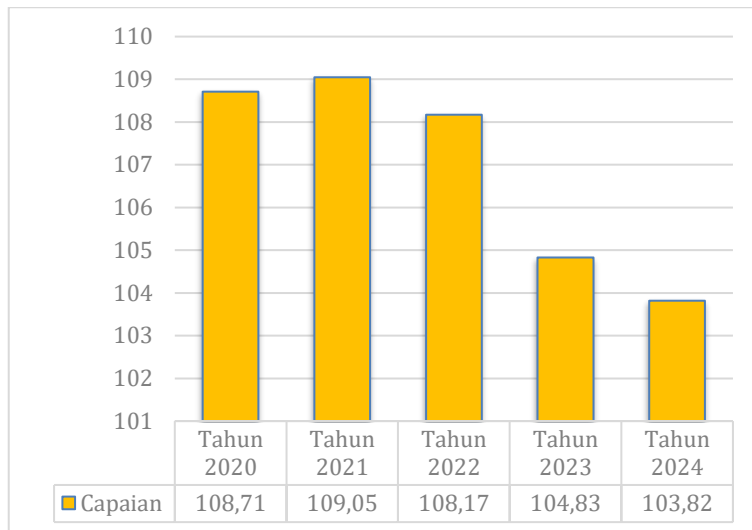
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Biak



Mochamad Erwin



RINGKASAN EKSEKUTIF



Gambar 1. Capaian Kinerja 2020 s.d Tahun 2024

Stasiun PSDKP Biak memiliki Rencana Strategis 2020-2024 yang mencakup berbagai sasaran strategis untuk diimplementasikan. Berdasarkan data yang tersedia, capaian menunjukkan predikat kinerja **“Baik”** pada tahun 2020, dengan tren peningkatan kinerja sebesar 0,34 poin pada tahun 2021. Namun capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 0,88 poin pada tahun 2022, 3,34 poin pada tahun 2023 dan 1,01 poin pada tahun 2024. Penurunan capaian kinerja pada tahun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penambahan indikator kinerja baru, peningkatan target pada indikator kinerja yang sudah ada, dan perubahan metode perhitungan akibat penambahan komponen evaluasi.

Stasiun PSDKP Biak selalu berpedoman pada dokumen Perencanaan Kinerja (PK) dalam melaksanakan pencapaian target kinerjanya. Pada tahun 2024, dilakukan dua kali revisi, yakni tanggal 30 Desember 2024. Revisi tersebut meliputi Perjanjian Kinerja (PK) 2024, Informasi Indikator Kinerja 2024, dan Rincian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024.

Kolaborasi yang optimal yang ditunjukkan oleh unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak berhasil mendorong pencapaian kinerja tahun 2024 sebesar 103,82 dengan predikat **“Baik”**. Seluruh target kinerja berhasil dicapai 100%, bahkan terdapat beberapa indikator kinerja melampaui target hingga 120,00%.

Kebijakan ekonomi biru untuk kelautan dan perikanan berkelanjutan menjadi prioritas pengawasan Stasiun PSDKP Biak. Pada tahun 2024, pengawasan dilakukan terhadap beberapa program prioritas, yaitu: ¹⁾ Pengawasan kegiatan perikanan dan non-perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya; ²⁾ Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi; ³⁾ Pengawasan pemanfaatan ruang laut; ⁴⁾ Pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K); ⁵⁾ Pengawasan destructive fishing; dan ⁶⁾ Pengawasan kampung budidaya prioritas nasional.



PROFIL PIMPINAN

Mochamad Erwin (Kepala Stasiun PSDKP Biak)



“Standar terburuk dalam bekerja adalah kesempurnaan. kita tidak akan pernah bisa melangkah maju bila mengejar persiapan yang sempurna”

Mochamad Erwin lahir di Bogor, Jawa Barat pada 12 Juni 1983. Setelah menempuh pendidikan D4 di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Stasiun PSDKP Biak, beliau memiliki pengalaman sebagai Pengawas Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan, Koordinator Satwas di Tarempa, Kasubsi OPPP di Stasiun PSDKP Pontianak, serta Kasi SARPRAS di Pangkalan PSDKP Lampulo.

The top half of the page features an abstract background composed of several overlapping, curved, and angular shapes in various shades of orange and yellow, creating a dynamic, layered effect.

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020- 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Biak tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP berfungsi untuk menyebarkan informasi mengenai capaian kinerja dalam satu tahun anggaran, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Biak untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya dalam pengelolaan sumber daya serta kebijakan yang dipercayakan. Pertanggungjawaban ini harus didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan, dengan tujuan utama mewujudkan prinsip-prinsip "*Good Governance*".

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKj adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Ditjen PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media komunikasi dalam pencapaian kinerja pengawasan pemanfaatan SDKP setiap tahun kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan LKj adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja di masa mendatang. Proses ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024, telah dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Unit Usaha Perikanan Tangkap

- Kapal penangkapan ikan yang tidak melakukan migrasi ke kewenang perizinan pusat, namun masih melakukan operasi penangkapan ikan di atas 12 mil.
 - Kapal penangkapan ikan melakukan alih muatan dengan mitra yang tidak diizinkan.
 - Kapal perikanan mematikan transmitter dengan berbagai alasan.
 - Kapal perikanan tidak melaporkan kedatangan kepada syahbandar dan pengawas perikanan.
 - Kapal perikanan mendaratkan ikan tanpa persetujuan bongkar.
 - Nilai pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sesuai dengan jumlah dan jenis ikan pada Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)
 - Kapal perikanan sering berlindung di kawasan konservasi, dan tidak melaporkan aktivitas tersebut.
2. Unit Usaha Budidaya Perikanan
 - Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran Kawasan pesisir dan laut;
 - Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan;
 - Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.
 3. Pengelolaan Limbah pada Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
 - Penggunaan obat-obatan, pestisida, dan bahan kimia lain dalam budidaya ikan juga dapat mencemari air;
 - Unit usaha non-perikanan, seperti pabrik, sering membuang limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, bahan organik yang tidak terurai, dan limbah cair;
 - Banyak unit usaha tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik dan seringkali membuang limbah langsung ke lingkungan tanpa perlakuan yang memadai;
 - Pembuangan sampah plastik dan limbah padat dari berbagai unit usaha khususnya kapal perikanan dapat menambah pencemaran lingkungan;
 - Kerap kali regulasi mengenai pengelolaan limbah tidak diterapkan secara konsisten atau unit usaha tidak mematuhi peraturan yang ada.
 4. Unit Usaha Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di area /zona pemanfaatan Kawasan konservasi belum memiliki izin TDKP;
 - Aktivitas penangkapan ikan ilegal yang ditakutkan akan menyebabkan Kerusakan habitat, penurunan keanekaragaman hayati, konflik dengan aturan konservasi;
 - Nelayan tidak memahami peraturan konservasi atau dampak kegiatan penangkapan mereka;
 - Nelayan bergantung pada kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi untuk mata pencaharian mereka;
 - Ketegangan antara nelayan lokal dan pengelola kawasan konservasi;
 5. Unit Usaha yang Diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak

- Masih terdapat nelayan lokal yang menggunakan alat penangkap ikan yang merusak;
 - Nelayan yang tidak sadar akan dampak penangkapan ikan yang merusak cenderung tidak mematuhi peraturan;
 - Penegakan hukum yang tidak efektif menyebabkan penangkapan ikan yang merusak terus berlangsung, yang berdampak pada kerusakan habitat laut dan penurunan stok ikan.
6. Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi
- Penangkapan hiu tanpa kuota dapat menyebabkan overfishing, yang mengancam kelangsungan hidup populasi hiu dan keseimbangan ekosistem laut;
 - Keterbatasan kualifikasi pengawas perikanan dalam identifikasi jenis ikan dilindungi menjadi kendala dalam kegiatan pengawasan.
7. Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom dan bius;
 - Eksploitasi mangrove;
 - Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.
8. Unit Usaha Pemanfaatan Ruang Laut
- Terdapat kegiatan reklamasi yang tidak disertai dengan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bangunan di atas laut seperti restoran, dermaga, karamba, began dan lain-lain belum memiliki izin PKKPR;
 - Potensi konflik antara petugas dengan pemerintah daerah dalam penertiban pemanfaatan ruang laut yang dikelola oleh pemerintah daerah.



1.4 Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Biak merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Biak menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas.
- 4) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan.
- 5) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 6) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan surat tugas tim kerja nomor B.24/PSDKPSta.8/KP.440/II/2024, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi ⁽¹⁾Kepala Urusan Umum; ⁽²⁾Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan; ⁽³⁾Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan; ⁽⁴⁾Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; dan ⁽⁵⁾Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas. Dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

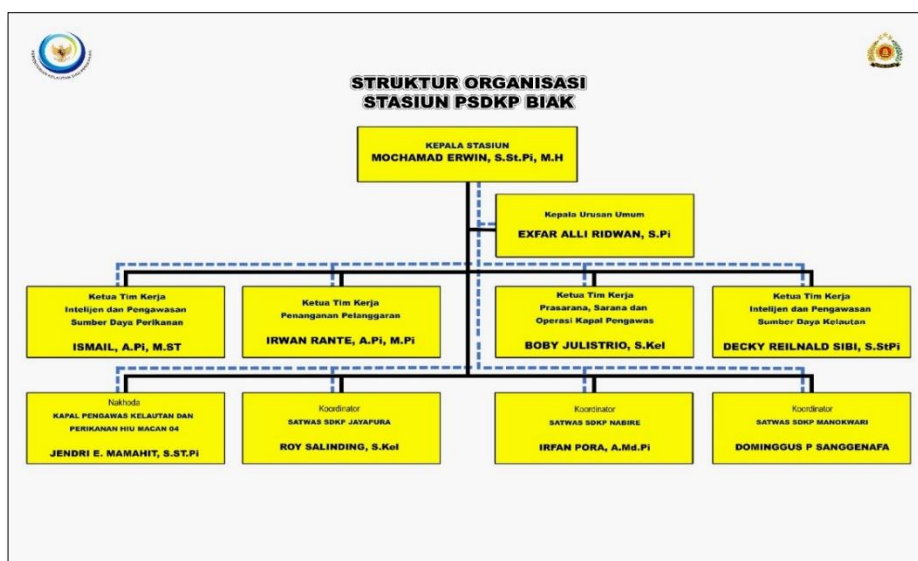
a. Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Urusan Umum

Melakukan ⁽¹⁾Penyusunan rencana, program dan anggaran; ⁽²⁾Pengelolaan kinerja; ⁽³⁾Pengelolaan keuangan dan barang milik negara; ⁽⁴⁾pengelolaan sumber daya manusia aparatur; ⁽⁵⁾Evaluasi dan pelaporan; ⁽⁶⁾Pengelolaan organisasi dan tata laksana; ⁽⁷⁾Pengelolaan kearsipan, persuratan, dan kerumah tanggaan.

- c. Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Melakukan ⁽¹⁾Pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya; ⁽²⁾Pengawasan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; ⁽³⁾Pengawasan pengusahaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar oleh pelaku usaha (PMA/PMDN) dan/atau orang asing; ⁽⁴⁾Pemeriksaan pemanfaatan ruang laut; ⁽⁵⁾Pengawasan dan pemeriksaan pemanfaatan Kawasan konservasi, Jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk Appendiks CITES; dan ⁽⁶⁾Pengawasan kegiatan *Destructive Fishing*.
- d. Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Melakukan ⁽¹⁾Pengawasan dan pemeriksaan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan; ⁽²⁾Pengawasan penangkapan ikan terukur; ⁽³⁾Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.
- e. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Melakukan ⁽¹⁾Pelaksanaan dan Penetapan pengenaan sanksi administratif; ⁽²⁾Pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan; ⁽³⁾Pemantauan penuh kewajiban pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif kelautan dan perikanan; ⁽⁴⁾Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan .
- f. Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas Melaksanakan ⁽¹⁾Penyusunan rencana operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas; ⁽²⁾Pelaksanaan operasional kapal pengawas dan speedboat pengawas; ⁽³⁾Monitoring dan evaluasi prasarana, saran dan operasi kapal pengawas; ⁽⁴⁾Penyusunan rencana dan penyiapan kebutuhan logistic personil dan logistik kapal pengawas; ⁽⁵⁾Pelaksana dan pengawasan pemeliharaan dan perawatan pencegahan prediktif dan darurat kapal pengawas.



Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Biak

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

Lampiran

Melampirkan Perjanjian Kinerja semula, Perjanjian Kinerja Revisi, dan Penghargaan yang diterima.

The top half of the page features an abstract background composed of overlapping, curved, and angular shapes in various shades of orange and yellow, creating a dynamic and modern visual effect.

PERENCANAAN KINERJA

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan utama tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan Penerapan Prinsip Ekonomi Biru
Menedepankan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
2. Optimalisasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatkan kualitas tata kelola, pengawasan, dan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.
4. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
Memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui akses permodalan, pelatihan, dan teknologi.
5. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan
Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan untuk mengurangi praktik ilegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

KKP telah merumuskan 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen. PSDKP, yaitu: Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, terdapat pula arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Ditjen. PSDKP untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

1. Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku ilegal fishing dan destructive fishing; dan
2. Pembinaan (penaatan) terhadap nelayan lokal.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dan arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan dan rincian strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP

- d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun prasarana pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Instansi terkait lainnya), dengan cara:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK)
 - b. Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi)
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
 - e. Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, represif (ultimum remedium).
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”

- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Tujuan khusus dari perjanjian kinerja adalah sebagai berikut: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Menjadi dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ Menjadi dasar penetapan sasaran kinerja serta pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024 telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu *Spesific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART).

Stasiun PSDKP Biak senantiasa berpedoman pada Dokumen Perencanaan Kinerja (PK) dalam melaksanakan pencapaian target kinerjanya. Pada tahun 2024, dokumen tersebut telah direvisi sebanyak dua kali, dengan revisi terakhir dilakukan pada tanggal 30 Desember 2024. Berdasarkan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP nomor B.5322/PSDKP.1/RC.210/XII/2024 tentang Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur indikator dan target kinerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 september 2024 perihal Revisi Target dan Manual Indikator Kinerja NKA KKP TA 2024 dan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 2526/SJ.1/RC.610/IX/2024 tanggal 26 September 2024 hal Hasil Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Revisi Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024 dan Persiapan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, indikator Nilai Kineraj Anggaran berubah nomenkelaturnya menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan target level 2 (satker) semula 82, menjadi 71.
2. Memorandum Ketua Tim Kerja Manajemen Transformasi Nomor 1080/PSDKP.1/TU.210/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 hal Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Pengelolaan Kinerja Tahun 2024 Tim Kinerja Manajemen Transformasi, terdapat penyesuaian target indikator Nilai Implementasi Program Budaya Kerja semula 21 menjadi 70.

Tabel 1. Target kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA (Awal Tahun 2024)	INDIKATOR KINERJA (Akhir Tahun 2024)	TARGET Awal Tahun 2024	TARGET Akhir Tahun 2024	SATUAN
SK.1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	01	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (IKU)	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (IKU)	91,00	91,00	Indeks
		02	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (IKU)	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (IKU)	91,00	91,00	Indeks

NO.	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA (Awal Tahun 2024)	INDIKATOR KINERJA (Akhir Tahun 2024)	TARGET Awal Tahun 2024	TARGET Akhir Tahun 2024	SATUAN
		03	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (IKU)	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (IKU)	100,00	100,00	%
SK.2	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketetapan	04	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan (IKU)	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan (IKU)	100,00	100,00	%
		05	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (IKU)	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (IKU)	100,00	100,00	%
SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	06	Nilai pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (IKU)	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (IKU)	100,00	100,00	Nilai
SK.4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	07	Nilai pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (IKU)	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (IKU)	100,00	100,00	Nilai
SK.5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	08	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (IKU)	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (IKU)	80,00	80,00	Indeks
		09	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (IKU)	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (IKU)	80,00	80,00	Indeks
SK.6	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	10	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (IKU)	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (IKU)	93,00	93,00	Indeks
SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	11	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri dengan di Asistensi oleh Tim ZI PSDKP Biak (IK)	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri dengan di Asistensi oleh Tim ZI PSDKP Biak (IK)	75,00	75,00	Nilai
		12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	100,00	100,00	%
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	70,00	70,00	Nilai
		14	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	82,00	82,00	Indeks
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	84,00	84,00	Nilai
		16	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang DOKumen Tindak Lanjutnya Telah	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang DOKumen Tindak Lanjutnya Telah	80	80	%

NO.	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA (Awal Tahun 2024)	INDIKATOR KINERJA (Akhir Tahun 2024)	TARGET Awal Tahun 2024	TARGET Akhir Tahun 2024	SATUAN
			Dilengkapi dan Disampaikan (IK)	Dilengkapi dan Disampaikan (IK)			
		17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (IK)	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (IK)	21,00	70,00	Nilai
		18	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Biak (IK)	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Biak (IK)	1,00	1,00	Inovasi
		19	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	80,00	80,00	Indeks
		20	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	94,00	94,00	%
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	80,00	80,00	%
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	80,00	80,00	%
		23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	93,76	93,76	Nilai
		24	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	Nilai Kinerja Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	82	71	Nilai

2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja adalah salah satu komponen utama dalam implementasi pengelolaan kinerja untuk menjamin akuntabilitas melalui klarifikasi data kinerja yang akan dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen PSDKP dilakukan dengan mengikuti formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau manual indikator kinerja.

Nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan dan tahunan) dengan membandingkan realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Kinerjaku berbasis teknologi informasi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan kemudian dituangkan dalam LKj yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.



Gambar 3. Kinerja Stasiun PSDKP Biak



AKUNTABILITAS K I N E R J A

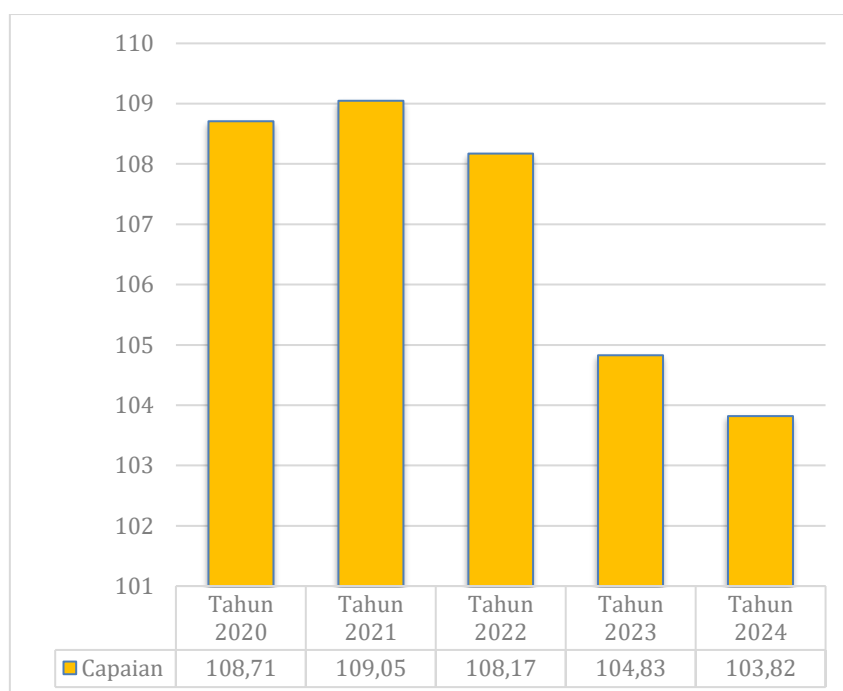
III. AKUNTABILITAS KINERJA

Penetapan sasaran pada awal tahun 2024 merupakan ekspektasi yang harus dicapai Stasiun PSDKP Biak. Untuk tahun 2024, Stasiun PSDKP Biak menetapkan 7 sasaran kegiatan, yang terdiri dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Mandatori (IKM). Pemenuhan ekspektasi kerja akan terus dilakukan sepanjang tahun 2024. Selama proses pemenuhan tersebut, dilakukan dua kali revisi perencanaan kinerja.

Perubahan rencana kinerja dilakukan pada tanggal 30 Desember 2024, mencakup perubahan nomenkelatur dan nilai target pada indikator kinerja sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak dengan target 82.00, yang berubah nomenkelatur-nya menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak dengan target baru 71.00
2. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja yang semula memiliki target 21.00 berubah menjadi 70.00

Pada Tahun 2024, Stasiun PSDKP Biak memperoleh nilai kinerja sebesar 103,82 dengan kategori **"Baik"**. Nilai tersebut didukung oleh 7 sasaran, yang terdiri dari 10 IKU dan 14 IKM yang diukur. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 1,01 poin dapat dilihat pada Gambar 3. Capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.



Gambar 3. Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d. 2024

Tabel 2. Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
SK.1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif		106,20	
01.	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	91,00	100,00	109,89

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
02.	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91,00	98,94	108,73
03.	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100,00	100,00	100,00
SK.2	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan		100,00	
04.	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100,00	100,00	100,00
05.	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100,00	100,00	100,00
SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan		100,00	
06.	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100,00	100,00	100,00
SK.4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan		100,00	
07.	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100,00	100,00	100,00
SK.5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas		100,00	
08.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80,00	80,00	100,00
09.	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	80,00	80,00	100,00
SK.6	Terselenggaranya PenyidikanTindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas		107,53	
10.	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93,00	100,00	107,53
SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP		113,03	
11.	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP	75,00	90,40	120,00
12.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	100,00	100,00	100,00
13.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Biak	70,00	83,33	119,04
14.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak	82,00	86,92	106,00
15.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	84,00	85,85	102,20
16.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80,00	100,00	120,00
17.	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70,00	81,05	115,79
18.	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan (Inovasi)	1,00	1,00	100,00
19.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak	80,00	99,63	120,00
20.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	94,00	132,50	120,00

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak(%)	80,00	100,00	120,00
22.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	80,00	88,75	110,94
23.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	93,76	95,49	101,85
24.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	71,00	96,18	120,00

Pada Tahun 2024, Stasiun PSDKP Biak melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja yang dicapai telah dimonitor dan dievaluasi secara menyeluruh. Analisis pencapaian kinerja dapat dilihat pada setiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

3.1 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Sasaran ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp7.107.525.000 (Tujuh Miliar Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Dari jumlah tersebut, Terdapat pagu efektif dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.138.301.000 (Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah). Hingga akhir tahun 2024, realisasi anggaran mencapai Rp6.138.190.422 (Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang setara dengan 86,36% dari total alokasi anggaran dan 100% dari total alokasi pagu efektif.

Tabel 3. Efisiensi Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

No	Output Program pada SS tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
2350. QHD.0 01	Operasi Kapal Pengawas	43	43	100%	6.726.075.000	5.756.827.821	6.726.075.000	969.247.179
2350. QHD.0 03	Operasi Speedboat Pengawas	30	30	100%	381.450.000	381.362.601	381.450.000	87.399
Total Alokasi Anggaran					7.107.525.000			
Total (AA x COP) - RA					969.334.578			
Efisiensi Sasaran Strategis					13,64%			

Berdasarkan perbandingan antara alokasi anggaran dengan biaya yang digunakan secara efisien untuk mendukung terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif, diperoleh persentase efisiensi sebesar 13,64%.

Sasaran kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja utama, yang secara keseluruhan dipenuhi pencapaiannya. Indikator utama tersebut, yaitu:

1. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks),
2. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks), dan
3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

Pada Tahun 2024, capaian untuk sasaran *Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif* mencapai 106,20%. Capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,7 poin dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan target pada tahun 2024 terhadap dua indikator kinerja utama, yaitu **Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas** dan

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas. Detail capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Sasaran ini digunakan sejak tahun 2022, untuk mendukung program prioritas nasional kelautan dan perikanan. Program prioritas nasional yang didukung meliputi:

1. Penangkapan ikan terukur (PIT); serta
2. Pengawasan serta pengendalian kawasan konservasi, Kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pada bulan September 2024 Renstra 2020-2024 mengalami revisi sehingga nilai indikator pada sasaran ini dapat dibandingkan dengan Renstra 2020-2024 (lihat pada Tabel 4).

Tabel 4. Efisiensi Sasaran terselenggaranya operasi armada yang efektif

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
SK.1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif										106,20	108,9	117		
01.	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	Indeks	91	87,6	91	100	100	120	-	-	109,89	114,16	120	-	-
02.	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	Indeks	91	87,6	91	98,94	100	116,5	-	-	108,73	114,16	120	-	-
03.	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	%	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran/indikator ini dicapai dengan memanfaatkan informasi yang telah disusun dalam peta kerawanan pelanggaran. Informasi dari peta kerawanan tersebut digunakan untuk memfokuskan operasi pengawasan pada titik-titik rawan pelanggaran, sehingga memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan operasi armada Pengawasan SDKP. Selain itu, efisiensi juga diupayakan dengan memastikan setiap komponen penyusun dalam kegiatan operasi pengawasan selalu tercapai secara optimal.

1. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas merupakan standar untuk mengukur efektivitas kegiatan pemantauan dan operasi kapal yang dilakukan oleh kapal pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Biak. Indeks ini mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif yang telah dikuantifikasi, yaitu:

1. Pemeriksaan, meliputi pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%),
2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%),
3. Tindak Lanjut Target Operasi, termasuk Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan serta Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%),
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya, seperti Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (Bobot 5%).

Realisasi indeks kinerja operasi kapal pengawas pada 2024 mencapai 100,00 indeks atau 109,89% dari target 91,00. Capaian ini dihasilkan dari kegiatan pemantauan dan operasi armada pengawasan KP HMC 04 di WPP 715, WPP 716, dan WPP 717. Detail hasil pemantauan dan operasi kapal pengawas sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian faktor perhitungan indeks operasi kapal pengawas

No.	Faktor Perhitungan	Capaian Per TW			
		I	II	III	IV
1.	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	40	23,50	40	40
2.	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	40	66,15	40	40
3.	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	15	15	15	15
4.	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	5	5	5	5
Total Nilai Indeks		100,00	109,65	100,00	100,00

Keberhasilan kinerja pada indikator ini didukung oleh operasi KP Hiu Macan 04. Faktor utama yang mendukung keberhasilan ini adalah pelaksanaan pemeriksaan kapal perikanan yang optimal dan cakupan wilayah pengawasan yang berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Rincian capaian KP HMC 04 pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

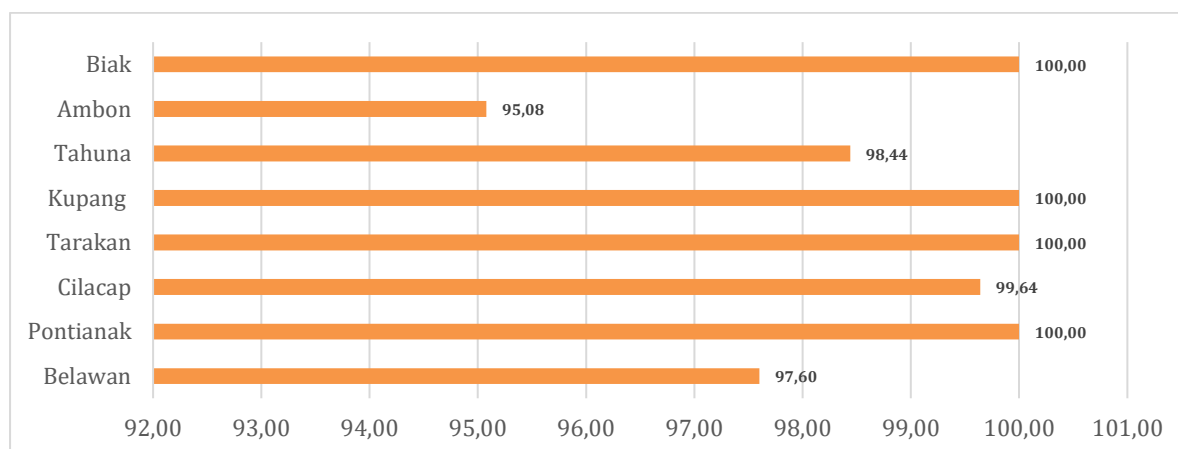
1. Pemeriksaan kapal perikanan tercapai sebanyak 120 KII,
2. Pemeriksaan kelautan tercapai sebanyak 10 daerah konservasi,
3. Cakupan wilayah pengawasan tercapai sebesar 2,14%.

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, menunjukkan bahwa realisasi pada tahun 2024 mencapai nilai 100,00 indeks, atau lebih tinggi 9,00 poin dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024 (Revisi). Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian indikator ini tetap sama. Perbedaan nilai hanya terjadi pada tahun 2022 akibat perbedaan metode perhitungan capaian indikator, yang mengakibatkan nilai melebihi 100,00 indeks.

Tabel 6. Capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
01.	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	Indeks	91	87,6	91	100	100	120	-	-	109,89	114,16	120	-	-

Apabila dibandingkan dengan UPT sekelas, Stasiun PSDKP Biak menunjukkan pencapaian yang berada di atas rata-rata dengan nilai indeks rata-rata sebesar 98,85 dan capaian sebesar 100,00 indeks. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 4.

**Gambar 4. Perbandingan kinerja operasi kapal pengawas**

Keberhasilan operasional armada pengawasan SDKP didukung oleh kematangan dalam persiapan rencana operasi kapal pengawas, mencakup personil, armada, logistik, serta informasi terkait perkiraan cuaca dan kerawanan kegiatan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*. Informasi terkait perkiraan cuaca digunakan untuk menentukan waktu pelaksanaan operasi pengawasan, yang berhubungan dengan keselamatan personil dan armada. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan operasional armada pengawasan diupayakan dengan selalu memenuhi target faktor perhitungan pada setiap operasi pengawasan.

2. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas adalah standar yang digunakan untuk mengukur perkembangan kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh speedboat pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Biak. Indeks kinerja operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang telah dikuantifikasi, yaitu:

1. Pemeriksaan, yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%),
2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%),
3. Tindak Lanjut Target Operasi, yang terdiri dari intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan serta dukungan kegiatan SAR (Bobot 15%),
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya, yang terdiri dari penyitaan alat tangkap terlarang, pemutusan rumpon ilegal, dan dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi (Bobot 5%).

Stasiun PSDKP Biak memiliki dua armada speedboat pengawas, yaitu: ⁽¹⁾ Speedboat Napoleon 041 yang berada di Stasiun PSDKP Biak, dan ⁽²⁾ Speedboat Dolphin 016 yang berada di Satwas SDKP Jayapura. Pada tahun 2024, indikator kinerja ini menargetkan sebanyak 30 hari operasi dengan cakupan WPPNRI sebesar 0,0005%.

Capaian indikator indeks kinerja operasi speedboat pengawas hingga tahun 2024 adalah 98,94 Indeks, atau sebesar 108,73% dari target 91,00 Indeks. Rincian capaian speedboat pengawas Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Speedboat Napoleon 041, sebagai berikut:

- Pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 42 kapal ikan Indonesia
- Pemeriksaan kelautan sebanyak 37 pemeriksaan daerah konservasi dan *Destructive Fishing*
- Cakupan wilayah pengawasan sebesar 0,0005%

2. Speedboat Dolphin 016, sebagai berikut:

- Pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 32 kapal ikan Indonesia
- Pemeriksaan kelautan sebanyak 21 pemeriksaan *Destructive Fishing*
- Cakupan wilayah pengawasan sebesar 0,00001%

- Kapal perikanan yang ditangkap sebanyak 5 kapal ikan Indonesia

Tabel 7. Capaian faktor perhitungan indeks operasi speedboat pengawas

No.	Faktor Perhitungan	Capaian Per TW			
		I	II	III	IV
1.	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	40	113,89	40	40
2.	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	40	43,55	40	40
3.	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	15	15	15	15
4.	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	5	5	5	5
Total Nilai Indeks		100	177,44	100	100

Operasional speedboat pengawas memanfaatkan informasi terkait perkiraan cuaca untuk menentukan waktu pelaksanaan operasi pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselamatan personil dan armada. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan operasional armada pengawasan diupayakan dengan selalu memenuhi target faktor perhitungan pada setiap operasi pengawasan.

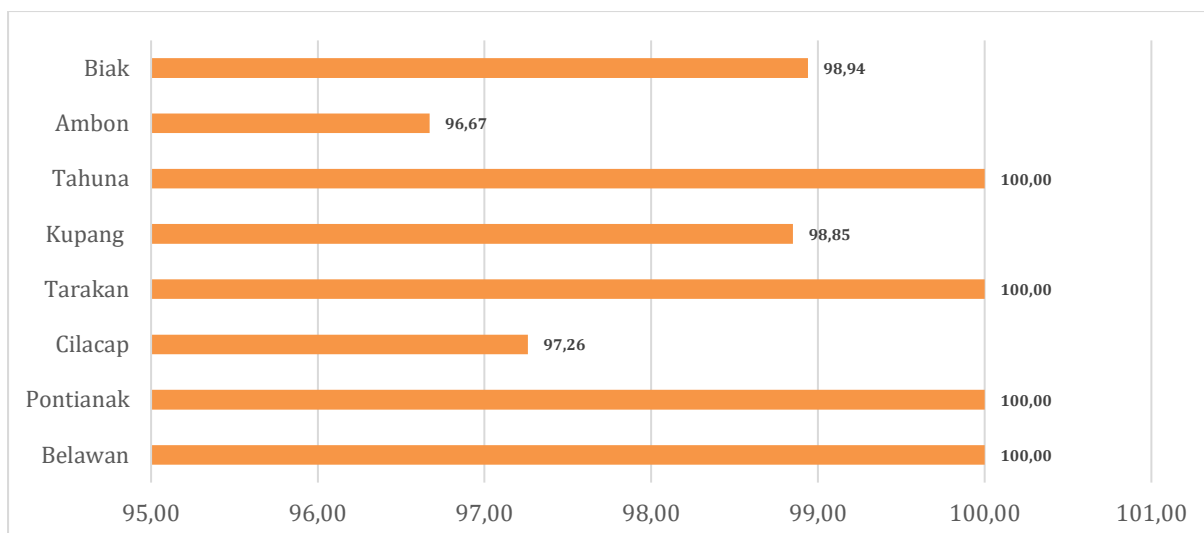
Keberhasil indeks kinerja operasi speedboat pengawas didukung oleh kesiapan teknis speedboat pengawas dalam operasi. Kesiapan teknis ini memungkinkan speedboat pengawas untuk mengawasi area yang melebihi target yang ditetapkan.

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024, menunjukkan bahwa realisasi pada tahun 2024 mencapai nilai 98,94 indeks, atau lebih tinggi 7,94 poin dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024 (Revisi). Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indikator ini lebih rendah karena terdapat target pemeriksaan kapal perikanan yang tidak tercapai pada speedboat *Napoleon 041* akibat kondisi cuaca buruk saat pelaksanaan operasi.

Tabel 8. Capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
02.	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	Indeks	91	87,6	91	98,94	100	116,5	-	-	108,73	114,16	120	-	-

IKU ini Jika dibandingkan dengan UPT sekelas, Stasiun PSDKP Biak menunjukkan pencapaian yang berada di bawah rata-rata dengan nilai indeks rata-rata 98,97 indeks dan capaian sebesar 98,94 indeks. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya target pemeriksaan kapal perikanan pada speedboat *Napoleon 041*, yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca buruk selama pelaksanaan operasi. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Perbandingan kinerja operasi speedboat pengawas)

3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas adalah standar yang digunakan untuk mengukur tingkat terpenuhinya logistik armada dalam mendukung operasi pengawasan SDKP di lingkup Stasiun PSDKP Biak. Faktor-faktor yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan BBM kapal pengawas (30%),
2. Pemenuhan kebutuhan pelumas kapal pengawas (20%),
3. Pemenuhan bahan makanan AKP (25%),
4. Pemenuhan kebutuhan air bersih kapal pengawas (15%),
5. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan kapal pengawas (5%),
6. Pemenuhan kebutuhan senjata api (5%).

Capaian rata-rata persentase pemenuhan logistik pada tahun 2024 mencapai 100% dari target 100%. Capaian indikator ini didukung oleh kemampuan awak kapal dalam mengatur belanja dan menganalisis kebutuhan harian kapal. Selain itu, keterlibatan pimpinan juga berpengaruh terhadap kehati-hatian dalam belanja sesuai peruntukannya. Capaian indikator ini mencerminkan upaya Stasiun PSDKP Biak dalam memastikan kesiapan operasi kapal pengawas setiap bulannya. Capaian pemenuhan logistik kapal pengawas per triwulan sebagaimana pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian persentase pemenuhan logistik kapal pengawas

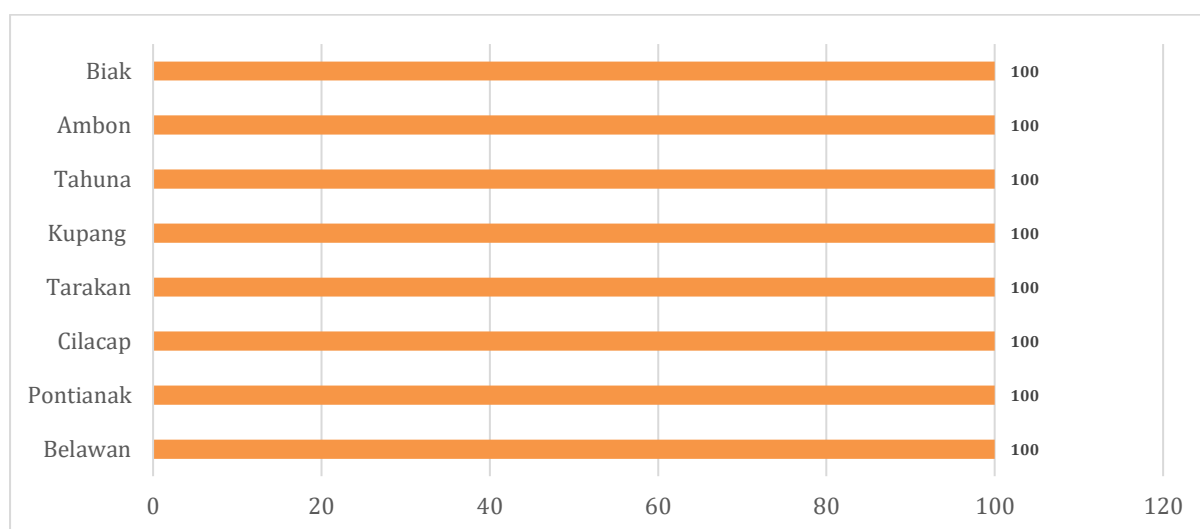
Faktor Perhitungan	Capaian Per TW (%)			
	I	II	III	IV
Bahan Bakar Minyak (BBM)	30	30	30	30
Pelumas	20	20	20	20
Bahan Makan	25	25	25	25
Air Tawar	15	15	15	15
Alat-alat Pelayanan	5	5	5	5
Senjata Api	5	5	5	5
Capaian Kinerja	100	100	100	100
Nilai Rata-rata	100			

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 (Revisi), menunjukkan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun, capaian ini hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2023 karena pada tahun-tahun sebelumnya terdapat perbedaan metode perhitungan dan perubahan nomenklatur.

Tabel 10. Capaian IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
03.	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	%	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT sekelas, menunjukkan bahwa capaian Stasiun PSDKP Biak sama dengan rata-rata capaian UPT, yaitu 100%. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Perbandingan capaian pemenuhan logistik

Penyebab keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemenuhan logistik armada adalah adanya monitoring rutin yang dilakukan setiap bulan. Monitoring ini mencakup pemeriksaan ketersediaan logistik, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara sisa logistik, yang kemudian menjadi dasar untuk pemenuhan logistik.

Efisiensi penggunaan SDM dalam pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP dilakukan dengan melibatkan AKP yang bertugas memantau semua aktivitas terkait penggunaan logistik. Pemenuhan logistik kapal pengawas dapat terpenuhi dengan baik berkat dukungan dari pihak luar seperti PT Pertamina Patra Niaga (untuk BBM kapal pengawas) dan PT. Trakindo Utama (untuk pelumas kapal), yang memastikan ketersediaan BBM dan pelumas untuk operasi kapal pengawas sepanjang tahun anggaran 2024.

3.2 Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Sasaran ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp4.556.453.000 (Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Dari jumlah tersebut, Terdapat pagu efektif dengan alokasi anggaran

sebesar Rp4.537.935.000 (Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Hingga akhir tahun 2024, realisasi anggaran mencapai Rp4.537.500.357 (Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang setara dengan 99,58% dari total alokasi anggaran dan 100% dari total alokasi pagu efektif. Efisiensi terhadap sasaran ini dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Efisiensi Sasaran Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

No	Output Program pada SS tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
2350.C BQ.00 1	Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun	1	1	100%	1.013.728.000	1.010.251.949	1.013.728.000	3.476.051
2350.R CG.00 1	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	3	3	100%	3.542.725.000	3.527.248.408	3.542.725.000	15.476.592
Total Alokasi Anggaran					4.556.453.000			
Total (AA x COP) - RA					18.952.643			
Efisiensi Sasaran Strategis					0,42%			

Sasaran kegiatan pembangunan dan perawatan sarana serta prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan didukung oleh indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan

Pelaksanaan sasaran kinerja didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp1.013.728.000 (Satu Miliar Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dari jumlah tersebut, Terdapat pagu efektif dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.010.364.000 (Satu Miliar Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Pada tahun 2024, total realisasi anggaran mencapai Rp1.010.251.949 (Satu Miliar Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yang setara dengan 99,65% dari total alokasi anggaran dan 99,99% dari total alokasi pagu efektif. Indikator ini dinilai berdasarkan kemajuan fisik/konstruksi pembangunan pagar pada Satwas SDKP Manokwari sebanyak 1 unit.

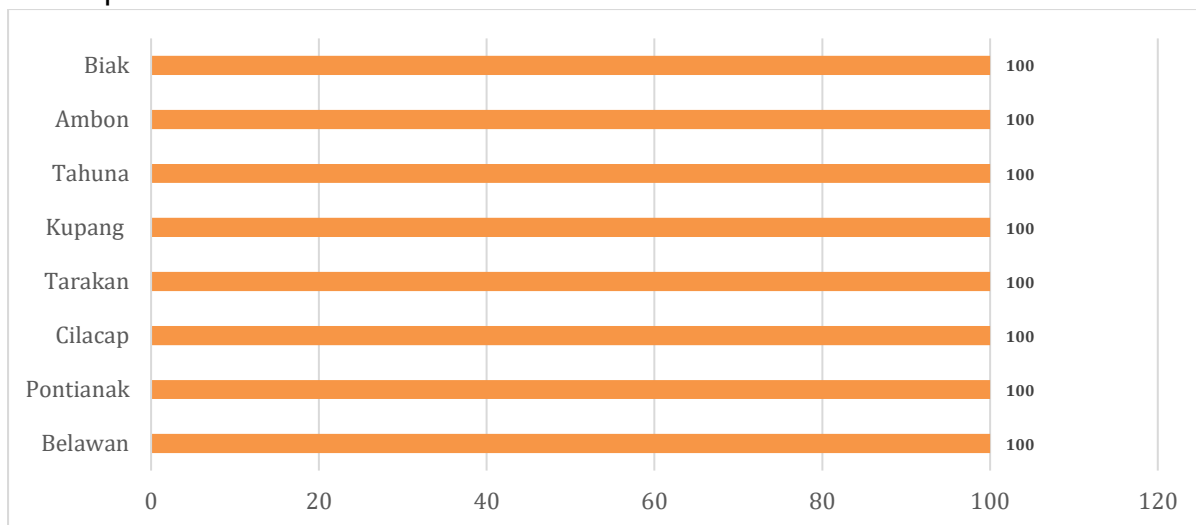
Pada Tahun 2024, capaian untuk IKU **Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan** mencapai 100,00%. Namun, capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena IKU tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun 2024. Indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2020-2024 (Revisi), mendapatkan persentase sesuai dengan target yang telah ditentukan. Detail capaian dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian IKU Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
04.	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	%	100	-	100	100	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT sekelas, menunjukkan bahwa capaian Stasiun PSDKP Biak sama dengan rata-rata

capaian UPT, yaitu 100%. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Perbandingan capaian sarana dan prasarana yang diselesaikan

Keberhasilan tercapainya IKU **Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan** terhadap kegiatan pembangunan pagar pada Satwas SDKP Manokwari sebanyak 1 unit, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif antara PSDKP Biak, satuan kerja Manokwari, dan pihak terkait, ketersediaan anggaran yang memadai, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara berkala, kualitas sumber daya manusia dan material yang digunakan, kondisi lapangan yang mendukung, serta komitmen dan dukungan penuh dari manajemen untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target dan standar yang telah ditetapkan.

2. Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

Indikator ini menargetkan pelaksanaan perawatan terhadap 1-unit kapal pengawas dan 2-unit speedboat pengawas. Pelaksanaan sasaran kinerja didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp3.542.725.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Dari jumlah tersebut, Terdapat pagu efektif dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.527.571.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). Pada tahun 2024, total realisasi anggaran mencapai Rp3.527.248.408 (Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) yang setara dengan 99,56% dari total alokasi anggaran dan 99,99% dari total alokasi pagu efektif.

Indikator ini dinilai berdasarkan persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang berhasil diselesaikan untuk mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana yang telah selesai pemeliharaan dan perawatannya meliputi KP Hiu Macan 04, SP Napoleon 041, dan SP Dolphin 016.

Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP, terdiri dari:

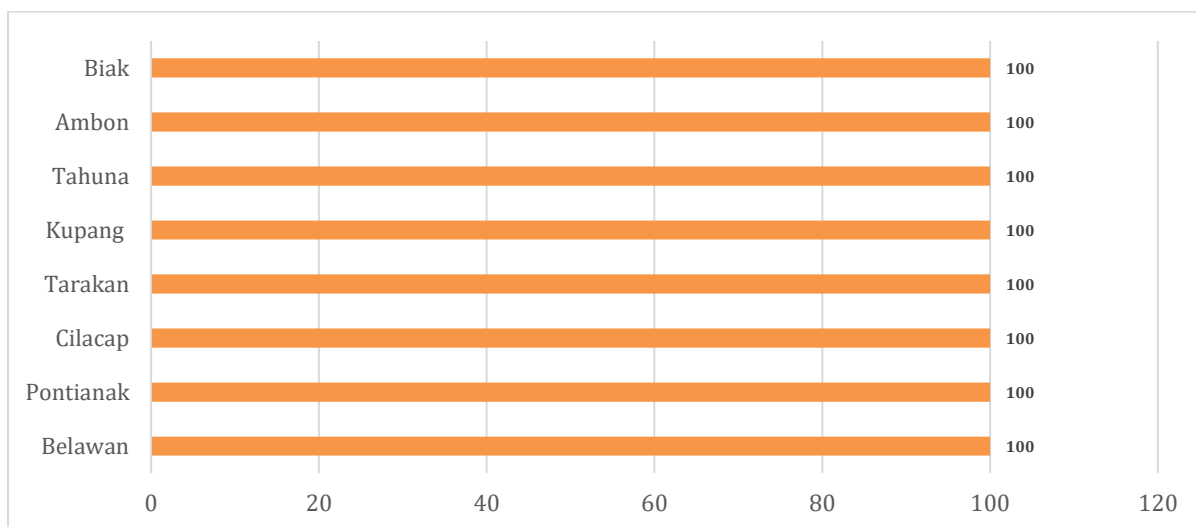
1. Perawatan pencegahan (preventive maintenance) sebesar 50%,
 - Pemeliharaan dan perawatan rutin
 - Penedokan atau pelimbungan
 - Servis/perbaikan
 - Pengecekan Rutin
2. Perawatan prediktif (predictive maintenance) sebesar 40%, dan
 - Perlengkapan Kapal Pengawas
3. Perawatan darurat (breakdown maintenance) sebesar 10%.
 - Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat.

Berdasarkan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan pada tahun 2024, persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP tercapai sebesar 100,00%. Indikator kinerja hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2023, sedangkan untuk periode sebelumnya tidak dapat dibandingkan, karena terdapat perubahan nomenkelatur pada indikator ini. Indikator ini juga jika dibandingkan dengan target jangka menengah mendapatkan persentase sesuai dengan target yang ditentukan tertuang pada Renstra 2020-2024 (Revisi). Detail capaian dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian IKU Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
05.	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	%	100	100	100	100	100	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT sekelas, menunjukkan bahwa capaian Stasiun PSDKP Biak sama dengan rata-rata capaian UPT, yaitu 100%. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Perbandingan capaian sarana dan prasaranan yang diselesaikan

Keberhasilan tercapainya IKU **Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP** disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan tidak hanya dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Biak. Dalam pelaksanaannya dilibatkan pihak ketiga pada setiap kegiatan. Keterlibatan pihak ketiga pada pekerjaan perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas, serta speedboat pengawas. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran yang sudah di rencanakan. Keberhasilan pencapaian atas IKU ini antara lain :

1. pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP dapat dilakukan secara preventive, predictive, dan breakdown.
2. Keberhasilan pencapaian kinerja pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP didukung oleh monitoring rutin setiap pelaksanaan pekerjaan.
3. Dilakukan juga rapat evaluasi apabila terdapat permasalahan pada kegiatan monitoring. Selanjutnya sebelum pekerjaan diserahkan dari pihak ketiga, Stasiun PSDKP Biak melakukan screening untuk mengetahui keseluruhan tahapan telah dilaksanakan dengan tepat.

3.3 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

Sasaran pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan didukung oleh indikator kinerja utama yang mencakup nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha serta pemanfaatan sumber daya kelautan. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Biak untuk memenuhi sasaran ini meliputi:

- 1) Pengawasan terhadap unit usaha yang memanfaatkan kawasan konservasi perairan nasional,
- 2) Pengawasan terhadap unit usaha perikanan dan non-perikanan dalam hal kepatuhan pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya,
- 3) Pengawasan terhadap unit usaha dalam pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang termasuk dalam Apendiks CITES, serta pemeriksaan kepatuhannya,
- 4) Pengawasan terhadap unit usaha dalam pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pemeriksaan kepatuhannya,
- 5) Pengawasan terhadap unit usaha ruang laut, serta pemeriksaan kepatuhannya,
- 6) Pengawasan terhadap unit usaha perikanan yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Sasaran strategis ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp654.500.000 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Dari jumlah tersebut, Terdapat pagu efektif dengan alokasi anggaran sebesar Rp578.159.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Pada tahun 2024, total realisasi anggaran mencapai Rp577.784.418 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Belas

Rupiah) yang setara dengan 88,27% dari total alokasi anggaran dan 99,94% dari total alokasi pagu efektif. Efisiensi pada sasaran ini dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Efisiensi Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

No	Output Program pada SS tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
2352.B IC.004	Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	20	20	100%	49.500.000	40.234.161	49.500.000	9.265.839
2352. QIC.00 1	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	7	42	600%	450.000.000	382.734.553	2.700.000.000	2.317.265.447
2352. QIC.00 2	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	40	50	125%	75.000.000	74.939.744	93.750.000	18.810.256
2352.C AL.001	Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan	3	3	100%	80.000.000	79.875.960	80.000.000	124.040
Total Alokasi Anggaran					654.500.000			
Total (AA x COP) - RA					2.345.465.582			
Efisiensi Sasaran Strategis					358,36%			

Nilai rata-rata kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan pada tahun 2024 mencapai nilai 100,00, sebagaimana pada Tabel 15. Indikator kinerja hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2023, sedangkan untuk periode sebelumnya tidak dapat dibandingkan, karena terdapat perubahan nomenkelatur pada indikator ini. Indikator ini juga jika dibandingkan dengan target jangka menengah mendapatkan nilai sesuai dengan target yang ditentukan tertuang pada Renstra 2020-2024 (Revisi). Keberhasilan indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik dari Stasiun PSDKP Biak dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan. Dalam pelaksanaannya, Stasiun PSDKP Biak selalu melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Tabel 15. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
06.	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	Nilai	100	100	100	100	100	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

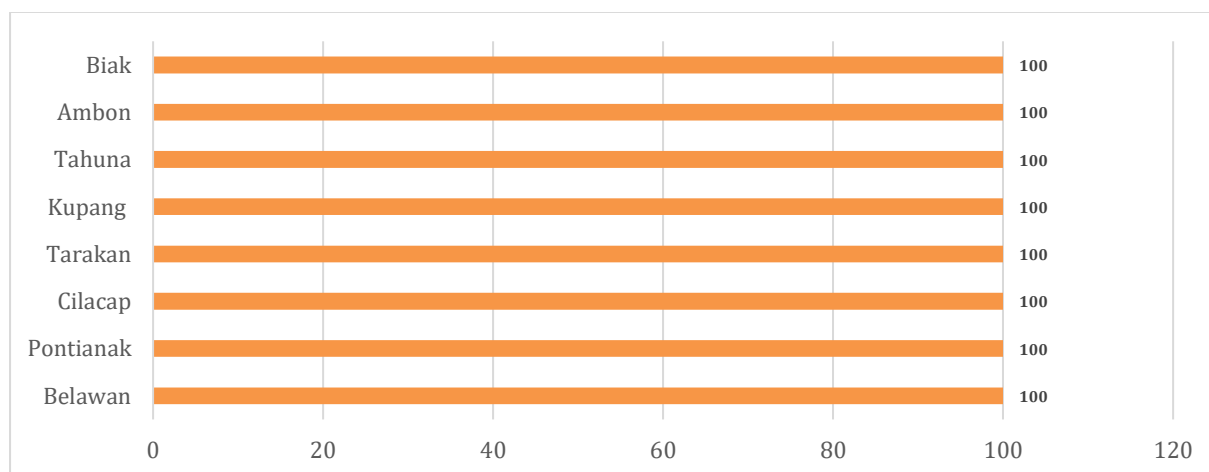
Secara umum, nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan pada tahun 2024 mencapai 100,00 kemudian nilai capaian tersebut dirata-ratakan dengan nilai triwulan sebelumnya. Pada tahun 2024, terdapat enam komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang telah diperiksa. Rincian capaian untuk setiap komponen adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan Kawasan konservasi (Nilai 100);
- 2) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan pengolahan limbah (Nilai 100);

- 3) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan jenis ikan yang dilindungi (Nilai 100);
- 4) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan *Destructive Fishing* (Nilai 100);
- 5) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan PKKPR (Nilai 100)
- 6) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan WP3K (Nilai 100)

Keberhasilan kegiatan ini juga memberikan dukungan terhadap tiga program prioritas ekonomi biru. Dukungan tersebut mencakup tiga program prioritas ekonomi biru, yaitu: ¹⁾ Memperluas kawasan konservasi laut; ²⁾ Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil; dan ³⁾ Pembersihan sampah plastik di laut.

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT sekelas, menunjukkan bahwa capaian Stasiun PSDKP Biak sama dengan rata-rata capaian UPT, yaitu 100. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Perbandingan capaian di level unit kerja (nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan)

Capaian sasaran kegiatan ini mencerminkan upaya pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, pengawas perikanan melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu pelaku usaha. Pengawasan sumber daya kelautan dilakukan secara rutin melalui patroli laut menggunakan *longboat* serta kunjungan ke lembaga usaha kelautan.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercapai melalui pemanfaatan informasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan patroli laut. Informasi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan meliputi: ⁽¹⁾ Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); dan ⁽²⁾ Isu-isu yang beredar di masyarakat terkait daerah rawan pelanggaran tindak pidana kelautan, jenis pelanggaran yang sering terjadi, serta kemungkinan waktu terjadinya pelanggaran.

Tahapan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan Polisi Khusus (POLSUS) meliputi penerimaan penugasan, pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan, dan pelaporan. Pada tahun

2024, pelaksanaan tahapan tersebut menghasilkan capaian sebanyak enam komponen objek pengawasan kelautan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran/indikator ini. Capaian output seluruh komponen pada indikator ini, dituangkan per triwulan sebagaimana pada Tabel 16.

Tabel 16. Capaian output pengawasan sumber daya kelautan

No	Uraian Kegiatan	Capaian Output Pengawasan SDK				
		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
1	Pengawasan kawasan konservasi	9	10	9	1	29
2	Pengawasan Pengolahan Limbah	4	6	5	5	20
3	Pengawasan PKKPR	1	6	-	-	7
4	Jenis Ikan yang Dilindungi	-	2	3	-	5
5	Pengawasan <i>destructive fishing</i>	10	13	21	6	50
6	Pengawasan WP3K	-	-	-	1	1

Berikut ini penjelasan mengenai uraian kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Biak:

1. Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi

Pelaksanaan pengawasan terhadap unit usaha kawasan konservasi difokuskan pada Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Padaido, yang terletak di Provinsi Papua. TWP Padaido ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2009 yang diperbaharui dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua dan pengelolaannya diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua untuk periode 2014-2034. Luas kawasan ini mencapai 183.000 hektar. Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dilakukan oleh pengawas perikanan dan POLSUS PWP3K, mencakup seluruh zona, dengan fokus pada kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pada tahun 2024, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembaga telah diawasi. Rata-rata merupakan nelayan lokal tradisional yang melakukan penangkapan ikan di area/zona pemanfaatan Kawasan konservasi. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan secara rutin memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha yang beroperasi di sekitar Kawasan Konservasi TWP Padaido. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait pentingnya menjaga kelestarian Kawasan tersebut.

2. Pengawasan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah

Pada tahun 2024, pengawasan terhadap pengelolaan limbah mencakup 20 (dua puluh) Lembaga yang telah diperiksa. Berdasarkan hasil analisis dari 20 lembaga tersebut, 17 (dua belas) Lembaga dinyatakan taat karena telah memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai. Namun, terdapat tiga lembaga yang terindikasi belum memiliki sistem pengelolaan limbah. Ketiga Lembaga tersebut telah diberikan sanksi administrative

berupa peringatan atau teguran tertulis, disertai surat edaran dari Kepala Stasiun PSDKP Biak terkait pencemaran sumber daya ikan dan lingkungan. Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh pemilik kapal perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan perikanan dalam wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak serta kapal perikanan yang beroperasi di WPP NRI 717.

3. Pengawasan pemanfaatan ruang laut

Pada tahun 2024, pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut telah mencakup tujuh lembaga yang diperiksa. Berdasarkan hasil analisis lima dari tujuh lembaga tersebut belum memiliki izin PKKPR/KKPR. Sebagai tindak lanjut, pengawas kelautan telah memberikan himbauan kepada kelima Lembaga tersebut untuk segera mengurus izin PKKPR/KKPR. Selain itu, sanksi administrative berupa Surat Peringatan (SP) 1 juga telah diberikan karena telah melakukan kegiatan reklamasi tanpa memiliki izin PKKPR.

4. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi

Pada tahun 2024, pengawasan terhadap jenis ikan yang dilindungi telah mencakup lima lembaga yang diperiksa. Berdasarkan hasil analisis, Lembaga-lembaga tersebut merupakan pelaku usaha di bidang penangkapan atau pengambilan ikan bersirip (*Pisces*) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *Apendiks CITES*. Seluruh Lembaga ini telah memenuhi persyaratan perizinana usaha, karena telah memiliki Surat Izin Penangkapan Jenis Ikan (SIPJI), Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) serta Surat Penetapan Kuota dari Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL).

5. Pengawasan terhadap unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak, Stasiun PSDKP Biak menerapkan metode pengawasan sebagai berikut:

- Menghentikan sementara aktivitas penangkapan ikan tanpa berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan.
- Melakukan pengecekan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan.
- Memeriksa kondisi fisik hasil tangkapan untuk memastikan tidak ada tanda-tanda penggunaan bom, racun atau setrum.

Jenis kapal perikanan yang umum digunakan oleh pelaku usaha *Destructive Fishing* berukuran kurang dari 5 GT, sering kali dilengkapi dengan alat tangkap bom ikan atau penyelaman yang menggunakan kompresor. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap unit penangkapan ikan selalu berfokus pada keberadaan kompresor di atas kapal, karena alat tersebut dapat menjadi indikasi pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan, seperti pengeboman, penyelaman, atau penggunaan racun ikan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap unit usaha perikanan yang terindikasi melakukan penangkapan ikan merusak pada tahun 2024 mencakup 50 (lima puluh) Lembaga yang telah diperiksa. Berdasarkan hasil analisis, 48 (empat puluh delapan) Lembaga diantaranya merupakan nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap seperti pancing dan jaring. Namun, terdapat dua lembaga ditemukan penggunaan alat tangkap berbahaya berupa bom ikan, yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya.

Stasiun PSDKP Biak telah mengambil beberapa Langkah tindak lanjut terhadap 2 lembaga yang terindikasi melakukan *Destructive Fishing*, sebagai berikut:

- Barang bukti yang digunakan telah diamankan dan disimpan di kantor Stasiun PSDKP Biak.
- Proses penyidikan menunjukkan bahwa hanya 1 tersangka terbukti melakukan kegiatan bom ikan.
- Berkas perkara tersangka yang terbukti melanggar diserahkan ke Kejaksaan dan sudah P-21
- Salah satu terduga pelaku usaha penangkapan ikan yang merusak tidak dilanjutkan ke proses hukum karena hasil penyelidikan menunjukkan tidak adanya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka.

6. Pengawasan WP3K

Sampai dengan akhir tahun 2024 terdapat 1 lembaga yang diawasi dari kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hasil pengawasan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran kelautan dan kerusakan lingkungan disekitarnya.

3.4 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan didukung oleh indikator kinerja utama nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi sasaran ini, meliputi:

- 1) Pengawasan rutin berbasis OSS (One Single Submission),
- 2) Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya Prioritas Nasional,
- 3) Pendampingan dalam pengawasan insidental.

Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dari jumlah tersebut, Terdapat pagu efektif dengan alokasi anggaran sebesar Rp335.378.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Pada tahun 2024, total realisasi anggaran mencapai Rp335.247.470 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang setara dengan 95,78% dari total alokasi anggaran dan 99,96% dari total alokasi pagu efektif. Efisiensi pada sasaran ini dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Efisiensi Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

No	Output Program pada SS tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
2353. QIC.004	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	25	37	148%	350.000.000	335.247.470	518.000.000	182.752.530
Total Alokasi Anggaran					350.000.000			
Total (AA x COP) - RA					182.752.530			
Efisiensi Sasaran Strategis					52,22%			

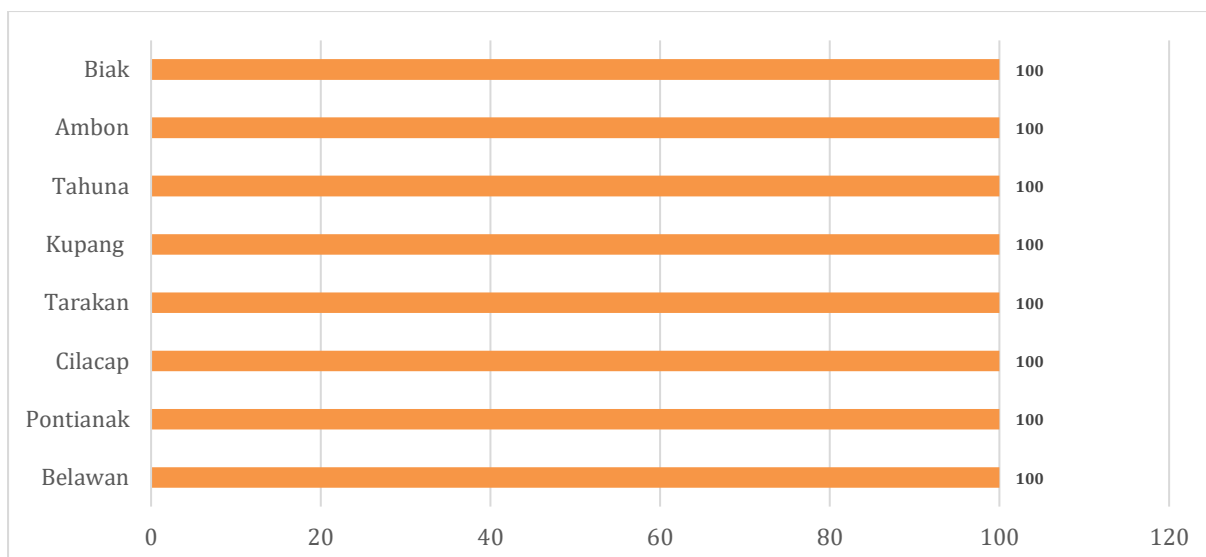
Keberhasilan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan dicapai melalui upaya pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, sesuai dengan ketentuan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021. Kualitas pengawasan dinilai berdasarkan kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pemenuhan dokumen. Pengawasan lainnya telah dijelaskan secara rinci dalam manual indikator kinerja Stasiun PSDKP Biak tahun 2024.

Secara keseluruhan, rata-rata kualitas pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan tahun 2024 mencapai nilai sempurna, yaitu 100. Pada tahun 2024, terdapat tiga komponen utama objek pengawasan yang diperiksa, yaitu pengawasan kampung budidaya prioritas nasional, pengawasan berbasis OSS, dan pengawasan incidental. Ketiga komponen ini juga mencapai nilai rata-rata penyelesaian sebesar 100. Indikator kinerja hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2023, sedangkan untuk periode sebelumnya tidak dapat dibandingkan, karena terdapat perubahan nomenkelatur pada indikator ini. Indikator ini juga jika dibandingkan dengan target jangka menengah mendapatkan nilai sesuai dengan target yang ditentukan tertuang pada Renstra 2020-2024 (Revisi). Detail capaian dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
07.	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	Nilai	100	100	100	100	100	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT sekelas, menunjukkan bahwa capaian Stasiun PSDKP Biak sama dengan rata-rata capaian UPT, yaitu 100. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Perbandingan capaian di level unit kerja (Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan)

Capaian ini mencerminkan komitmen pengawas perikanan dalam melaksanakan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Bidang Perikanan. Pengawas perikanan telah berupaya maksimal menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan melalui kerja sama yang erat dengan instansi terkait serta para pemangku kepentingan. Pada tahun 2024, pengawasan telah mencakup 37 (tiga puluh tujuh) Lembaga usaha perikanan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 19.

Tabel 19. Rekapitulasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan

Uraian Kegiatan	Capaian Output SDP				Total
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya Prioritas Nasional	6	9	11	-	26
Pengawasan Berbasis OSS	-	-	1	-	1
Pengawasan Insidental	-	-	2	8	10

Berikut ini penjelasan mengenai uraian kegiatan pengawasan sumber daya perikanan yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Biak:

1. Pengawasan Kampung Budidaya Perikanan Nasional

Pengawasan Kampung Budidaya Perikanan Nasional bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya perikanan di wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai kampung budidaya prioritas. Program ini juga berfokus pada pengawasan usaha budidaya yang mendukung peningkatan produksi perikanan secara berkelanjutan, melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Masyarakat setempat. Melalui pendekatan berbasis risikom pengawas perikanan Stasiun PSDKP Biak memastikan bahwa kegiatan budidaya tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga melindungi ekosistem perairan sekitarnya.

Pada tahun 2024 pelaksanaan pengawasan kampung budidaya perikanan telah memeriksa sebanyak 26 (dua puluh enam) Lembaga, yang terdiri dari 15 (lima belas) Lembaga dengan jenis KBLI pembesaran ikan air tawar, 5 lembaga dengan jenis KBLI pembesaran tumbuhan air laut, dan 6 lembaga dengan jenis KBLI pembesaran *Crustacea* air payau. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan praktik budidaya yang berkelanjutan sesuai dengan jenis kegiatan masing-masing Lembaga.

2. Pengawasan Berbasis OSS

Pengawasan berbasis OSS (*Online Single Submission*) adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap perizinan berusaha yang dikeluarkan melalui sistem OSS. Sistem ini memudahkan proses perizinan berbasis risiko, di mana pelaku usaha wajib mengikuti aturan dan standar yang telah ditetapkan sesuai Tingkat risikonya.

Dalam konteks pengawasan berbasis OSS, pengawas perikanan Stasiun PSDKP Biak melakukan pemantauan untuk memastikan:

- Kepatuhan pelaku usaha terhadap izin yang telah diterbitkan melalui OSS.
- Penerapan standar keamanan dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pengecekan terhadap pemenuhan komitmen yang tercantum dalam izin, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan dan kegiatan budidaya yang berkelanjutan.

Pengawasan ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, guna memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara transparan dan akuntabel, serta mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan.

Pada tahun 2024, telah dilakukan pengawasan berbasis OSS terhadap satu Lembaga dengan KBLI 03111, yaitu penangkapan ikan bersirip di laut. Berdasarkan hasil analisis, Lembaga tersebut dikategorikan “kurang baik” karena belum memiliki kapal penangkapan ikan sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan untuk mendorong pelaku usaha agar menjalankan aktivitas operasional sesuai dengan KBLI 03111 yang terdaftar dalam perizinan berusahnya.

3. Pengawasan Insidental

Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Biak telah melaksanakan pengawasan insidental terhadap 10 (sepuluh) lembaga, yang meliputi empat lembaga industri pembekuan ikan, empat lembaga pembesaran *crustacea* air payau, satu lembaga pembesaran *pisces*/ikan bersirip air payau, dan satu lembaga pembesaran ikan air tawar di kolam. Kesepuluh lembaga ini memerlukan pembinaan dan perbaikan lebih lanjut untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan.

3.5 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas

Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut:

1. Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (target indeks 80);
2. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (target indeks 80);

Sasaran strategis ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp156.500.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dari jumlah tersebut, Terdapat pagu efektif dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.134.000 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah). Pada tahun 2024, total realisasi anggaran mencapai Rp149.126.670 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang setara dengan 95,28% dari total alokasi anggaran dan 100% dari total alokasi pagu efektif. Efisiensi pada sasaran ini dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Efisiensi Sasaran Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas

No	Output Program pada SS tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
2351.B CE.U0 3	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif	5	16	320%	156.500.000	149.126.670	500.800.000	351.673.330
Total Alokasi Anggaran					156.500.000			
Total (AA x COP) - RA						351.673.330		
Efisiensi Sasaran Strategis						224,71%		

Sasaran kegiatan ini tidak tertuang pada Renstra 2020-2024 sehingga keseluruhan indikator tidak memiliki target jangka menengah. Sasaran ini digunakan sejak tahun 2023 untuk mendukung program prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan. Program prioritas nasional yang didukung secara tidak langsung meliputi:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; serta

Pada tahun 2024, capaian sasaran penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang tuntas mencapai 100,00, yang termasuk dalam kategori "baik". Namun, capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 20 poin dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan manual IKU pada tahun 2024, dimana kriteria indeks telah ditetapkan sehingga persentase capaian 100% hanya setara dengan nilai indeks 80. Rincian capaian sasaran ini dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Sasaran terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
SK.5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas										100	120	-	-	-
08.	Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	80	80	80	80	100	-	-	-	100	120	-	-	-
09.	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Indeks	80	80	80	80	100	-	-	-	100	120	-	-	-

1. Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indeks pengenalan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat penegakan aturan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran di Stasiun PSDKP Biak. Indeks ini mencakup berbagai pelanggaran, seperti penangkapan ikan ilegal, pelanggaran zona konservasi, atau pelanggaran terkait izin dan perizinan usaha perikanan. Faktor-faktor yang memengaruhi indeks ini biasanya meliputi:

- Jumlah kasus pelanggaran yang ditangani.
- Jenis sanksi yang dikenakan (teguran, denda, pencabutan izin, dll)
- Kepatuhan pelaku terhadap sanksi.
- Efektivitas sanksi dalam mencegah pelanggaran berulang.

Semakin tinggi indeks ini, biasanya mencerminkan semakin efektifnya penerapan kebijakan dan penegakan hukum di sektir kalutan dan perikanan, sehingga turut mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja utama untuk indeks pengenalan sanksi administratif dibidang kelautan dan perikanan sebesar 80,00 indeks. Indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah mendapatkan nilai sesuai dengan target yang ditentukan tertuang pada Renstra 2020-2024 (Revisi). Namun, capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 20 poin dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan manual IKU pada tahun 2024, dimana kriteria indeks telah ditetapkan sehingga persentase capaian 100% hanya setara dengan nilai indeks 80.

Tabel 22. Capaian IKU Indeks Pengenalan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
08.	Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	80	80	80	80	100	-	-	-	100	120	-	-	-

Stasiun PSDKP Biak telah menangani 16 (enam belas) perkara pengenalan sanksi administratif. Perkara tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) perkara kapal perikanan yang melanggar terkait VMS, daerah penangkapan ikan, dan izin telah habis, serta 6 perkara PKKPR yang melakukan kegiatan reklamasi dan pemanfaatan ruang laut tanpa dokumen perizinan PKKPR/KKPR. Terhadap 16 (enam belas) perkara tersebut, Stasiun PSDKP Biak telah menetapkan sanksi berupa Peringatan I (SP-1) dan denda administratif. Detail penetapan sanksi dapat dilihat dalam Tabel 23.

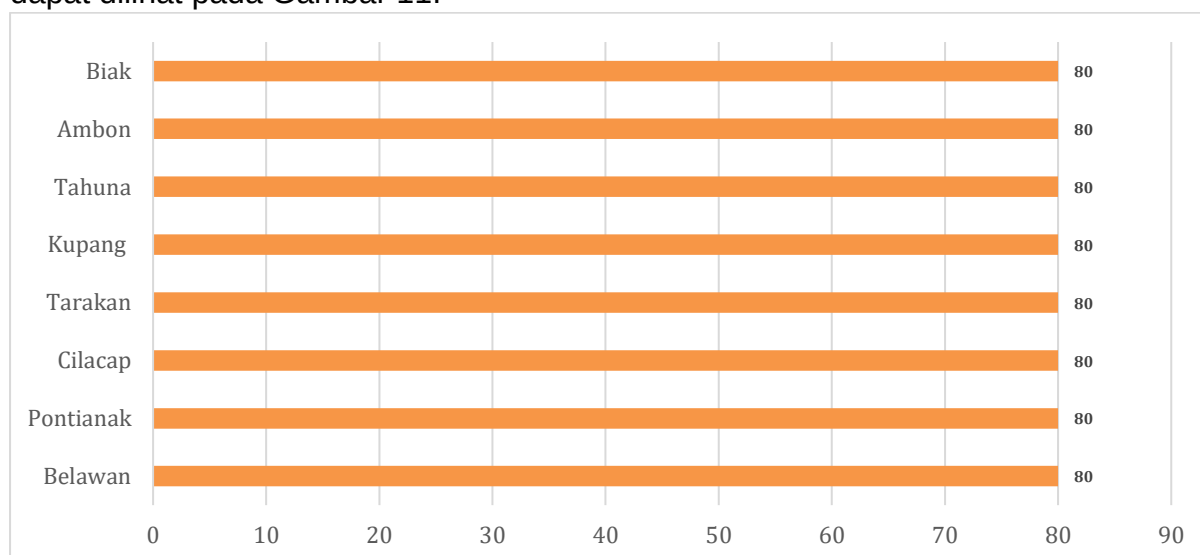
Tabel 23. Sanksi administratif yang ditetapkan

No	Nama Kapal/ Perusahaan	Jenis Pelanggaran	Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi
1	HARAPAN JAYA JUANDI	Jalur < 12 nm	Pelanggaran dilakukan oleh nakhoda KM. Harapan Jaya Juandi (14 GT), yang melakukan kegiatan perikanan tanpa memiliki SLO (Surat Lolos Pemeriksaan) dan SPB (Surat Pendaftaran Kapal). Kegiatan tersebut terjadi pada jalur I (di bawah 4 mil), yang secara kewenangan merupakan wilayah pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi Papua.	SP-1
2	JAGAD MINA SAMUDERA 02	Izin Habis > 30 hari	dokumen kepemilikan SKAT yang sudah habis masa berlakunya pada tanggal 03 November 2023, yang selanjutnya kita lakukan pengecekan monitoring aktivasi Transmitter VMS pada aplikasi Salmon di temukan indikasi telah terjadi dugaan pelanggaran atas tidak terpantaunya/on-off Transmitter VMS kapal terhitung dari tanggal 09 November 2023, Pukul 08.41 terakhir terpantau, dan kemudian baru terpantau kembali pada tanggal 25 Januari 2024, Pukul 11.48. Sehingga dari rentang waktu terakhir terpantaunya Transmitter VMS KM. Jagad Mina Samudra 02 sampai terpantau kembali terhitung 77 (tujuh puluh tujuh) hari.	Denda Administratif
3	CITRA MAJU – II	Jalur < 12 nm	KM. Citra Maju II (GT 147) terbukti dan meyakinkan melakukan pelanggaran dengan menangkap ikan di jalur yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha Perikanan Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 717 pada periode pemantauan 10-25 April 2024.	SP-1
4	AWINDO 11	DPI	KM. Awindo 11 terpantau melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas.	SP-1 dan Denda
5	SUMBER REJEKI-1	DPI	KM. Sumber Rejeki-1 terpantau melakukan penangkapan ikan di laut lepas.	SP-1
6	PESISIR ANDALAN	DPI	KM. Pesisir Andalan terpantau melakukan penangkapan ikan di laut lepas.	SP-1
7	Bintang Bahagia 79	DPI	KM. Bintang Bahagia 79 melakukan kegiatan penangkapan ikan di luar ZEEI atau dilaut lepas	SP-1 dan Denda
8	Bintang Bahagia 81	DPI	KM. Bintang Bahagia 81 melakukan kegiatan penangkapan ikan di luar ZEEI atau dilaut lepas	SP-1 dan Denda
9	Mikhael	Jalur < 12 nm	KM. Mikhael terindikasi melakukan pelanggaran jalur penangkapan ikan karena terpantau kurang dari 12 mil dari daratan terdekat, sehingga tidak sesuai dengan SIPI yang berlaku	SP-1
10	Tiberias 2	Jalur < 12 nm	KM. Tiberias 2 terindikasi melakukan pelanggaran jalur penangkapan ikan karena terpantau kurang dari 12 mil dari daratan terdekat, sehingga tidak sesuai dengan SIPI yang berlaku	SP-1
Pengenaan Sanksi PKKPR				
11	ABDUL RAHMAN MANSIM	PKKPRL	Berdasarkan hasil pengawasan Abdul Rahman Mansim diberikan sanksi administrasi dikarenakan tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut pada kegiatan reklamasi.	SP-1
12	PT. COISI KEY JAYA	PKKPRL	Pemanfaatan ruang laut melalui kegiatan reklamasi tanpa di lengkapi dengan pkkprl	SP-1
13	PT. INDIMATAM LINES	PKKPRL	Hasil inspeksi lapangan atas kegiatan dan dokumen perizinan yang dimiliki, PT. INDIMATAM LINES tidak memiliki perizinan PKKPR atas kegiatan reklamasi seluas 30 x 50 M2	SP-1
14	Moh. Djufri B. Santoso	PKKPRL	Pemanfaatan ruang laut melalui kegiatan reklamasi tanpa di lengkapi dengan pkkprl	SP-1
15	JUBER SITORUS	PKKPRL	Memanfaatkan ruang laut untuk kegiatan reklamasi pesisir dan keramba jaring apung tanpa persetujuan KKPRL	SP-1
16	PT. PLN UPK PAPUA DAN PAPUA BARAT	PKKPRL	Berdasarkan hasil pengawasan pemenuhan PKKPR di PT PLN UPK Papua dan Papua Barat Yang memanfaatkan ruang laut tanpa memiliki PKKPR	SP-1

Keberhasilan penyelesaian sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dicapai melalui upaya tindak lanjut pemberitahuan indikasi pelanggaran SPKP dari Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA). Tindak lanjut dilakukan oleh Pengawas Perikanan, Polsus WP3K, dan PPNS di lingkungan Stasiun PSDKP Biak yang memiliki kompetensi dalam menangani perkara tersebut.

Efisiensi penggunaan sumber daya dicapai dengan melibatkan SDM yang berkompeten dalam bidang penanganan pelanggaran administratif, sehingga pengambilan keputusan tidak mengalami tumpang tindih. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu, di mana sanksi dapat ditetapkan lebih cepat. Penggunaan aplikasi jaringan untuk ekspose sanksi administratif juga meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran.

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Biak setara dengan rata-rata capaian UPT lainnya, dengan nilai indeks rata-rata sebesar 80,00, dan Stasiun PSDKP Biak juga mencapai indeks sebesar 80,00. Detail perbandingan dengan UPT lainnya dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan)

2. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan mencerminkan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat berwenang terhadap orang atau pelaku usaha berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal yang menunjukkan dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Sumber data yang digunakan untuk mendukung indikator kinerja ini adalah hasil analisis pemeriksaan dari PUSDAL.

Capaian indikator kinerja utama indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2024 mencapai 80,00 indeks. Indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah mendapatkan nilai sesuai dengan target yang ditentukan tertuang pada Renstra 2020-2024 (Revisi). Namun, capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 20 poin dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan

manual IKU pada tahun 2024, dimana kriteria indeks telah ditetapkan sehingga persentase capaian 100% hanya setara dengan nilai indeks 80.

Tabel 24. Capaian IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
09.	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Indeks	80	80	80	80	100	-	-	-	100	120	-	-	-

Berdasarkan data dari PUSDAL, Stasiun PSDKP Biak telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 (empat belas) kapal yang diduga melakukan pelanggaran pada tahun 2024. Detail hasil analisis sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

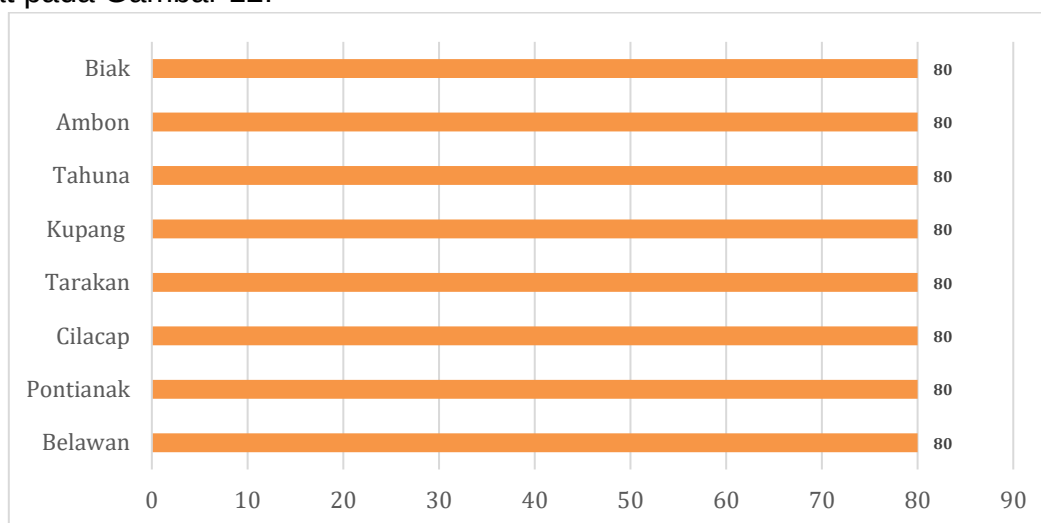
No	Nama Kapal	Jenis Pelanggaran Hasil Analisis PUSDAL	Analisis Lanjutan	Tindak Lanjut
1	Jagad Mina Samudra 02	Izin Habis >30 Hari	Sudah diproses	Denda Administratif
2	Harapan Jaya Juandi	Jalur (<12 nm)	Sudah diproses	SP-1
3	Citra Maju II	Jalur (<12 nm)	Sudah diproses	SP-1
4	Sanjaya	Jalur (<12 nm)	Sudah diproses	Bukan Pelanggaran
5	Sinar Makmur 307	DPI	Sudah diproses	Bukan Pelanggaran
6	Awindo 11	DPI	Sudah diproses	SP-1, dan denda administrative
7	Sumber Rejeki – 1	DPI	Sudah diproses	SP-1
8	Pesisir Andalan	DPI	Sudah diproses	SP-1
9	Karunia Alam 168	Transshipment	Sudah diproses	Bukan Pelanggaran
10	Bintang Bahagia 79	DPI	Sudah diproses	SP-1, dan denda administrative
11	Bintang Bahagia 81	DPI	Sudah diproses	SP-1, dan denda administrative
12	Mikhael	Jalur (<12 nm)	Sudah diproses	SP-1
13	SAMARU 05	DPI	Sudah diproses	Bukan Pelanggaran
14	Tiberias 2	Jalur (<12 nm)	Sudah diproses	SP-1

Keberhasilan kinerja pada indikator kinerja utama ini mencerminkan komitmen pimpinan dan tim penanganan pelanggaran dalam menyelesaikan setiap pemberitahuan hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan. Pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran berdasarkan hasil analisis dari PUSDAL

segera diperiksa dan dilakukan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh tim penanganan pelanggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya dicapai melalui pengumpulan bukti dukung secara sistematis, sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat terfokus pada dokumen pendukung yang sudah tersedia. Dengan demikian, waktu pemeriksaan dan BAP tidak lagi digunakan untuk mencari bukti dukung tambahan.

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Biak berada di atas rata-rata UPT lainnya, dengan nilai rata-rata indeks rata-rata sebesar 80,00 dan capaian Stasiun PSDKP Biak sebesar 80,00 indeks. Detail perbandingan dengan UPT lainnya dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan)

3.6 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Sasaran terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas didukung oleh indikator kinerja utama indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan. Indeks ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan proses penyidikan terhadap pelanggaran hukum di sektor kelautan dan perikanan. Indeks ini menggambarkan seberapa cepat dan tepat kasus-kasus tindak pidana seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan sumber daya laut, atau pelanggaran wilayah tangkap, dapat diselesaikan oleh otoritas berwenang.

Penyelesaian pada IKU ini dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (penyerahan tahap II).

Sasaran strategis ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp68.000.000 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah). Pada tahun 2024, total realisasi anggaran mencapai Rp67.916.525 (Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang setara dengan 99,88% dari total alokasi anggaran. Efisiensi pada sasaran ini dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Efisiensi Sasaran Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

No	Output Program pada SS tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
2351.B CE.U0 4	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	1	1	100%	68.000.000	67.916.525	68.000.000	83.475
Total Alokasi Anggaran					68.000.000			
Total (AA x COP) - RA					83.475			
Efisiensi Sasaran Strategis					0,12%			

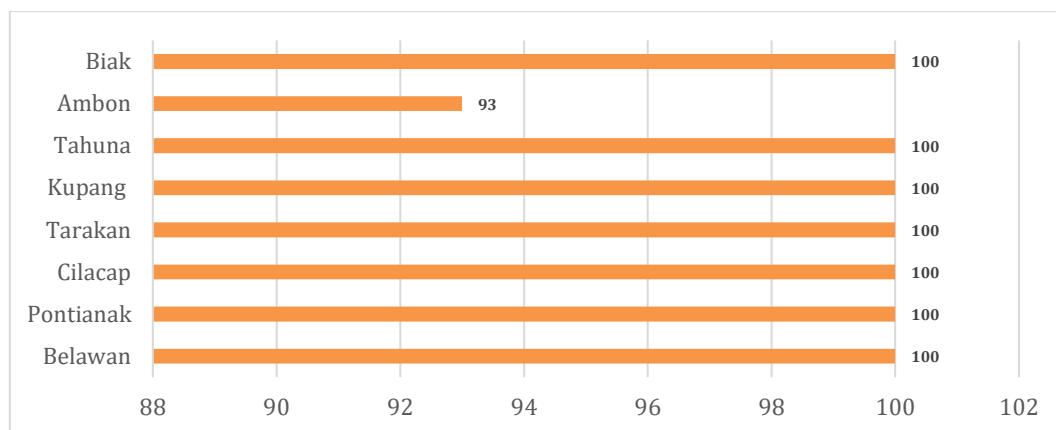
Pada tahun 2024, capaian sasaran Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas mencapai 107,53, yang termasuk dalam kategori "baik". Capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan sasaran ini muncul di perjanjian kinerja (PK) tahun 2024. Namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian indikator mendapatkan nilai yang cukup tinggi sebesar 7 poin dibandingkan dengan target yang tertuang di dalam Renstra 2020-2024 (Revisi). Detail capaian sasaran ini sebagaimana pada Tabel 27.

Tabel 27. Sasaran terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
SK.6	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas										107,53	-	-	-	-
10.	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Indeks	93	-	93	100	-	-	-	-	107,53	-	-	-	-

Keberhasilan capaian terhadap indikator kinerja utama **Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas** di lingkup Stasiun PSDKP Biak diukur melalui beberapa aspek, antara lain jumlah kasus yang diselesaikan (P21), kualitas berkas perkara berdasarkan penilaian kejaksaan, edisiensi waktu penyelesaian kasus, kerja sama antar-instansi, serta peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan sertifikasi. Monitoring dan evaluasi dari tim penanganan pelanggaran untuk memastikan penyidikan dilakukan secara professional, transparan, dan berdampak positif terhadap penegakan hukum serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Biak berada di atas rata-rata UPT lainnya, dengan nilai rata-rata indeks rata-rata sebesar 99,13 dan capaian Stasiun PSDKP Biak sebesar 100,00 indeks. Detail perbandingan dengan UPT lainnya dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan)

3.7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran strategis ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp11.867.619.000 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). Dari jumlah tersebut, Terdapat pagu efektif dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.776.578.000 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Pada tahun 2024, total realisasi anggaran mencapai Rp 11.772.665.103 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Rupiah) yang setara dengan 99,11% dari total alokasi anggaran dan 99,97% dari total alokasi pagu efektif. Efisiensi pada sasaran ini dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 28. Efisiensi Sasaran Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP

No	Output Program pada SS tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
2355.E BD.96 1	Layanan Reformasi Kinerja	1	1	100%	120.507.000	78.499.630	120.507.000	42.007.370
2355.E BD.95 5	Layanan Manajemen Keuangan	1	1	100%	81.863.000	81.860.906	81.863.000	2.094
2355.E BD.97 4	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	1	100%	77.707.000	49.232.352	77.707.000	28.474.648
2355.E BA.96 2	Layanan Umum	1	1	100%	74.0628.000	740.626.465	740.628.000	1.535
2355.E BC.95 4	Layanan Manajemen SDM	47	47	100%	137.229.000	137.224.581	137.229.000	4.419
2355.E BD.95 3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	100%	93.883.000	93.880.353	93.883.000	2.647
2355.E BD.95 2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	1	100%	98.424.000	98.421.838	98.424.000	2.162
2355.E BA.96 0	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	1	100%	12.054.000	12.053.200	12.054.000	800
2355.E BA.95 8	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	1	100%	35.168.000	14.589.720	35.168.000	20.578.280
2355.E BA.96 3	Layanan Data dan Informasi	1	1	100%	7.451.000	7.450.953	7.451.000	47
2355.E BA.95 6	Layanan BMN	1	1	100%	55.974.000	55.971.474	55.974.000	2.526

No	Output Program pada SS tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
2355.C AN.00 1	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	9	9	100%	100.000.000	99.882.000	100.000.000	118.000
2355.E BA.99 4	Layanan Perkantoran	1	1	100%	10.213.731.000	10.210.051.131	10.213.731.000	3.679.869
2355.E BB.95 1	Layanan Sarana Internal	24	24	100%	93.000.000	92.920.500	93.000.000	79.500
Total Alokasi Anggaran					11.867.619.000			
Total (AA x COP) - RA					94.953.897			
Efisiensi Sasaran Strategis					0,80%			

Sasaran kegiatan **“Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP”** didukung oleh 14 Indikator Kinerja Mandatory (IKM), sebagai berikut:

1. Nilai minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP;
2. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Stasiun PSDKP Biak;
3. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Stasiun PSDKP Biak;
4. Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak;
5. Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak;
6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
7. Nilai implementasi program budaya kerja;
8. Inovasi pelayanan public yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Biak;
9. Indeks kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak;
10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Biak;
11. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Biak;
12. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Biak;
13. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Biak;
14. Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Pada tahun 2024, nilai realisasi sasaran tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP mencapai 113,03. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sasaran ini mengalami peningkatan sebesar 4,05 poin. Terdapat penambahan indikator kinerja pada sasaran ini. Detail capaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Sasaran tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP										113,03	109	-	-	-
11.	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup	Nilai	75	-	75	90,40	-	-	-	-	120,00	-	-	-	

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
	Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP														
12.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	%	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
13.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Biak	Nilai	70	-	70	83,33	-	-	-	-	119,04	-	-	-	-
14.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak	Indeks	82	78	82	86,92	89,79	92,31	79,23	77,52	106,00	115,12	115,39	108,53	107,7
15.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	Nilai	84	80,05	84	85,85	78,8	-	-	-	102,20	97,89	-	-	-
16.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	%	80	75	80	100	75	100	-	-	120	100	120	-	-
17.	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	Nilai	70	21	21	81,05	27,34	25,84	-	-	115,79	120	120	-	-
18.	Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Biak (Inovasi)	Inovasi	1	1	1	1	1	1	-	-	100	100	100	-	-
19.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak	Indeks	80	-	80	99,63	-	-	-	-	120	-	-	-	-
20.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	%	94	92	94	132,50	100	100	100	53,33	120	108,7	116,28	119,05	65,04
21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak(%)	%	80	77,5	80	100	100	100	95	-	120	120	120	120	-
22.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	%	80	77,5	80	88,75	98,75	100	93,3	-	110,94	120	120	120	-
23.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	Nilai	93,76	93,75	93,76	95,49	94,73	96,68	91,85	88,78	101,85	101,05	108,63	103,2	100,9
24.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	Nilai	71	-	-	96,18	-	-	-	-	120	-	-	-	-

1. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP

Dalam rangka mendukung pencapaian predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup Stasiun PSDKP Biak, dilakukan penilaian berdasarkan indikator kinerja nilai minimal. Penilaian ini berfungsi untuk memastikan bahwa unit kerja telah memenuhi persyaratan standar reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi secara berkelanjutan. Unit kerja Stasiun PSDKP Biak diwajibkan untuk melakukan *Self Assessment* yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK.

Penilaian mandiri dilakukan secara sistematis berdasarkan 7 area perubahan yang menjadi fokus utama reformasi birokrasi, yaitu:

- Manajemen Perubahan
- Penataan Tatalaksana
- Penataan Manajemen SDM
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Penguatan Pengawasan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Komponen Hasil

Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Biak berhasil memenuhi target indikator kinerja **Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP** dengan capaian realisasi sebesar 90,40, melampaui target yang ditetapkan sebesar 75,00 atau mencapai 120% dari target.

Tabel 30. Capaian IKM Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
11.	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP	Nilai	75	-	75	90,40	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-

Keberhasilan ini diperoleh melalui proses penilaian mandiri satker yang dilaksanakan secara terukur dan terstruktur, serta didukung oleh asistensi intensif dari Tim Zona Integritas PSDKP, mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Nilai capaian setiap area ZI dapat dilihat pada table 31.

Tabel 31. Penilaian Unsur Zona Integritas Stasiun PSDKP Baik Tahun 2024

Penilaian				Bobot	Nilai	%
A.	PENGUNGKIT			60,00	54,01	
	I.	PEMENUHAN		30,00	26,46	88,20%
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	3,70	92,56%
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50	2,79	79,76%
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	3,78	75,63%
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	4,73	94,50%
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	6,50	86,67%
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	4,96	99,17%
	II.	REFORM		30,00	27,55	91,82%
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	3,67	91,75%
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50	2,00	57,19%
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	5,00	100,00%
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	5,00	100,00%
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	6,88	91,67%
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	5,00	100,00%
TOTAL PENGUNGKIT					54,01	90,01%
B.	HASIL			40,00	36,40	
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22,50	20,21	89,82%
		a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50	17,71	101,20%
		b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	2,50	50,00%
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50	16,19	92,50%
		a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50	16,19	92,50%
TOTAL HASIL					36,40	90,99%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					90,40	

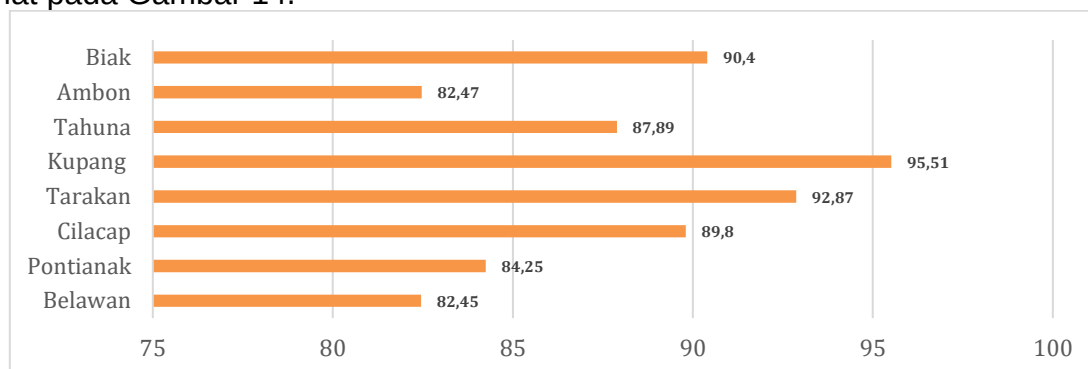
Berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa komponen yang perlu ditingkatkan dalam pembangunan zona integritas. Berikut adalah rangkuman dari komponen-komponen tersebut:

1. Penataan tata laksana masih memerlukan perbaikan, baik dalam pemenuhan standar operasional maupun dalam reformasi tata kelola. Stasiun PSDKP Biak perlu menyempurnakan prosedur, sistem pengelolaan tugas, dan alur kerja untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
2. Meskipun sudah ada upaya penataan, sistem manajemen SDM aparatur masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja aparatur. Diperlukan peningkatan pelatihan, pembinaan karier, dan penataan jabatan agar lebih sesuai dengan kompetensi.
3. Komponen capaian kinerja juga menjadi faktor pengurang yang signifikan dalam penilaian ini. Capaian kinerja yang lebih baik dari sebelumnya belum optimal, menandakan adanya stagnasi atau kurangnya peningkatan yang signifikan. Diperlukan Evaluasi dan perencanaan ulang untuk menetapkan target yang lebih ambisius dan implementasi yang lebih efektif dalam mencapai hasil yang lebih baik.

Dengan memperhatikan dan melakukan perbaikan pada komponen-komponen tersebut, diharapkan reformasi birokrasi dapat lebih maksimal dan memberikan hasil yang lebih baik dalam pembangunan zona integritas

Namun demikian, capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Biak masih berada di atas rata-rata UPT lainnya, dengan nilai rata-rata indeks sebesar 88,21 dan capaian Stasiun

PSDKP Biak sebesar 90,40 nilai. Detail perbandingan dengan UPT lainnya dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (ZI)

2. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak merupakan indikator kinerja baru yang dimana pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko (MR) dilakukan oleh pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi:

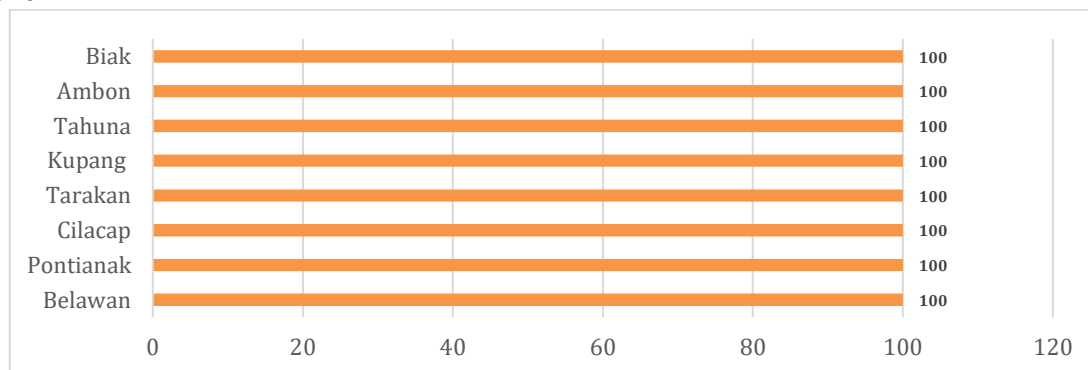
- rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi;
- aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam PERMEN-KP No. 10/2016. Berdasarkan informasi pada Tabel 15, nilai capaian MR Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2024 mencapai 100,00% dengan kategori "Baik." Keberhasilan ini tidak terlepas dari realisasi rencana pengendalian setiap risiko lingkup Stasiun PSDKP Biak. Dari 16 faktor risiko pada Tahun 2024, seluruhnya dapat dikendalikan sehingga output kegiatan bisa tercapai.

Tabel 32. Capaian IKM Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
12.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	%	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Biak setara dengan rata-rata capaian UPT lainnya, dengan nilai indeks rata-rata sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.



Gambar 15. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MR)

3. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Biak

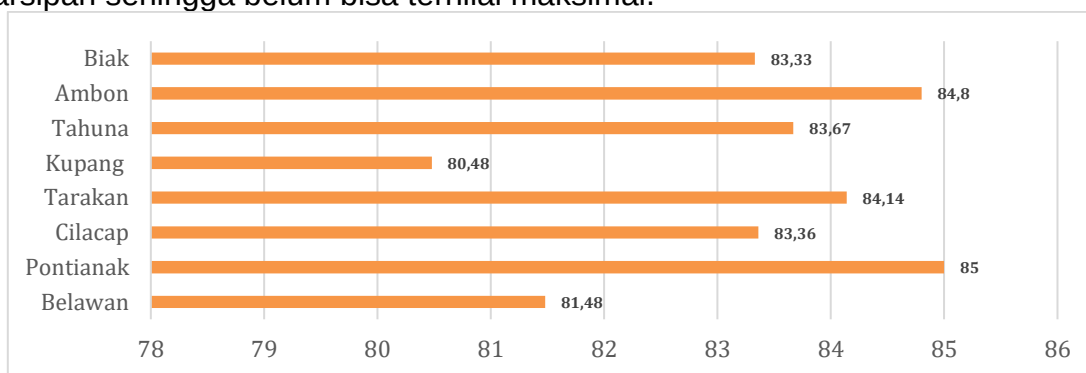
Pengelolaan kearsipan yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung tata kelola administrasi pemerintah yang efektif dan akuntabel. Indikator kinerja **Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup Stasiun PSDKP Biak** merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas unit kerja dalam mengelola arsip sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Penilaian ini mencakup kebijakan dan tata kelola kearsipan, pengelolaan arsip aktif dan inaktif, penyimpanan dan keamanan arsip, pengawasan serta evaluasi kearsipan, hingga pelayanan informasi arsip. Prosesnya melibatkan pengawasan internal oleh tim kearsipan, penilaian mandiri, dan pelaporan hasil untuk perbaikan berkelanjutan. Capaian indikator ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi operasional melalui pengelolaan arsip yang sistematis dan aman, tetapi juga mendukung profesionalisme, transparansi, dan pengurangan risiko hukum, sehingga memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan di Stasiun PSDKP Biak.

Berdasarkan Nota Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2290/SJ.6/TU.220/IX/2024 tanggal 24 September 2024 tentang penyampaian hasil pengawasan kearsipan internal KKP tahun 2024, Stasiun PSDKP Biak berhasil mencapai nilai 83,33, atau sebesar 119,04% dari target yang telah ditentukan. Capaian ini mencerminkan komitmen Stasiun PSDKP Biak dalam mengelola kearsipan secara efektif dan akuntabel. Keberhasilan pada capaian indikator kinerja ini diperoleh dari komitmen yang kuat dalam melaksanakan tata kelola kearsipan yang baik, dukungan penuh dari seluruh pegawai Stasiun PSDKP Biak, serta penerapan kebijakan pengelolaan arsip yang sesuai dengan regulasi. Selain itu, pelaksanaan audit internal yang terstruktur, lalu pengembangan kompetensi pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan arsip, turut berkontribusi dalam mencapai hasil yang melampaui target.

Tabel 33. Capaian IKM Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Biak

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
13.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Biak	Nilai	70	-	70	83,33	-	-	-	-	119,04	-	-	-	-

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Biak berada di atas rata-rata capaian UPT lainnya sebesar 83,28. Capaian ini dapat ditingkatkan pada tahun selanjutnya dengan melakukan pemenuhan terhadap ketentuan dalam setiap variabel penilaian yang masih rendah. Salah satu aspek yang masih ternilai nol adalah SDM Arsiparis yang belum terpenuhi. Stasiun PSDKP Biak hanya memiliki 1 Orang pegawai kontrak yang memiliki latar belakang pendidikan S1 selain kearsipan. Pengelola Arsip juga Belum mengikuti pengembangan kompetensi arsip seperti Diklat Teknis Kearsipan sehingga belum bisa ternilai maksimal.

**Gambar 16. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Kearsipan)**

4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak

Indeks profesionalitas ASN adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Stasiun PSDKP Biak. Profesionalitas ASN mencakup berbagai aspek, mulai dari kompetensi dan etika hingga kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil. Dengan memahami dan menerapkan indeks ini, diharapkan kinerja ASN di lingkup Stasiun PSDKP Biak dapat terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin masing-masing ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Bobot pengukuran diberikan sebagai berikut:

- Kualifikasi: 25%
- Kompetensi: 40%
- Kinerja: 30%
- Disiplin: 5%

Pada Semester II Tahun 2024, capaian Indeks Profesionalitas (IP) ASN di lingkup Stasiun PSDKP Biak mencapai nilai 86,92 atau 106,00% dari target yang ditetapkan sebesar 77,00. Capaian IP ASN dihitung berdasarkan komponen pengukuran dari 41 pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

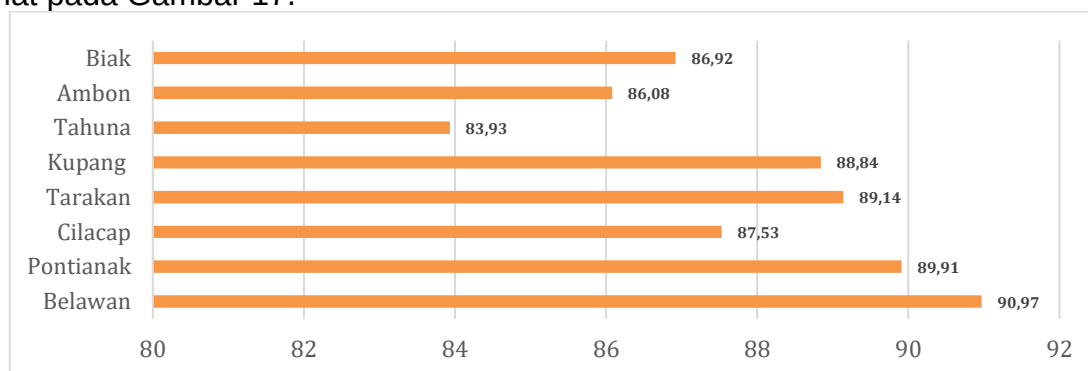
- Kualifikasi: Indeks Profesionalitas 20,93 dengan persentase 83,72%.

- Kompetensi: Indeks Profesionalitas 35,99 dengan persentase 89,98%.
- Kinerja: Indeks Profesionalitas 25 dengan persentase 83,33%.
- Disiplin: Indeks Profesionalitas 5 dengan persentase 100%.

Tabel 34. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
14.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak	Indeks	82	78	82	86,92	89,79	92,31	79,23	77,52	106,00	115,12	115,39	108,53	107,7

Jika dibandingkan dengan UPT sekelas lainnya, capaian Stasiun PSDKP Biak berada di bawah rata-rata UPT selevel dengan nilai indeks rata-rata sebesar 87,92 dan capaian sebesar 86,92 indeks. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IP ASN)

5. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak

Penilaian mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Stasiun PSDKP Biak adalah evaluasi internal yang dilakukan untuk menilai sejauh mana Stasiun PSDKP Biak telah menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja, sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penilaian ini merupakan bagian dari Upaya peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Stasiun PSDKP Biak di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Beberapa aspek yang dinilai dalam Penilaian Mandiri SAKIP meliputi:

- Perencanaan kinerja
- Pengukuran kinerja
- Pelaporan kinerja
- Evaluasi kinerja
- Peningkatan kinerja

Penilaian mandiri SAKIP ini penting dalam memastikan bahwa Stasiun PSDKP Biak terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, serta berkontribusi pada pencapaian kinerja instansi pemerintah yang lebih baik secara keseluruhan.

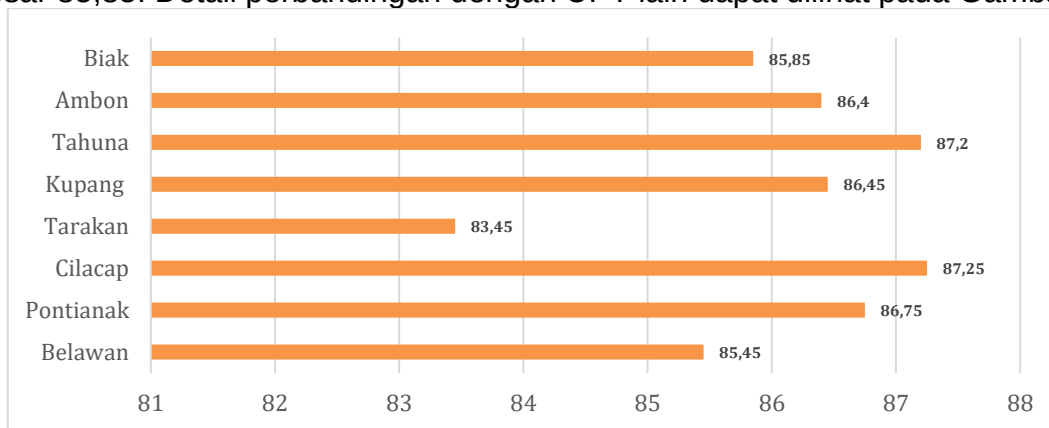
Pada tahun 2024, telah dilakukan penilaian mandiri SAKIP lingkup stasiun PSDKP Biak dengan nilai 85,85 kategori "Baik". Hasil penilaian ini berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB. Terdapat beberapa faktor yang mendukung dalam penilaian mandiri SAKIP, sebagai berikut:

- Peningkatan perencanaan kinerja: Stasiun PSDKP Biak telah menunjukkan kemampuan baik dalam Menyusun perencanaan kinerja yang sesuai dengan visi dan misi, serta mendukung target strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
- Konsistensi pengukuran kinerja: penggunaan indikator kinerja yang relevan dan berbasis data akurat memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Biak dapat diukur secara objektif.
- Kepatuhan pada prosedur pelaporan: Stasiun PSDKP Biak telah memenuhi kewajiban pelaporan kinerja sesuai jadwal dan mengikuti panduan teknis Kementerian PANRB, yang memastikan transparansi dan akuntabilitas.
- Evaluasi kinerja yang efektif: adanya mekanisme evaluasi internal yang memadai untuk menilai efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta adanya upaya perbaikan berkelanjutan, menjadi alasan lain yang mendukung nilai baik dalam penilaian SAKIP.
- Peningkatan dalam efisiensi dan efektivitas: Penilaian mandiri menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Biak telah berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif, sehingga mendukung pencapaian hasil signifikan dengan penggunaan anggaran yang optimal.

Tabel 35. Capaian IKM Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
15.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	Nilai	84	80,05	84	85,85	78,8	-	-	-	102,20	97,89	-	-	-

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Biak masih berada di bawah rata-rata, dengan nilai rata-rata capaian UPT lain sebesar 86,10 dan capaian Stasiun PSDKP Biak sebesar 85,85. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 18.



Gambar 18. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (SAKIP)

Untuk meningkatkan nilai SAKIP, Stasiun PSDKP Biak perlu melakukan perbaikan pada beberapa komponen SAKIP diantaranya:

1. Perencanaan Kinerja dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
2. Pengukuran Kinerja dijadikan kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

3. Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
4. Pelaporan Kinerja dijadikan acuan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan afisiensi kinerja

6. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d 30 September 2024 (Triwulan IV 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II pusat dan unit pelaksana teknis sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.

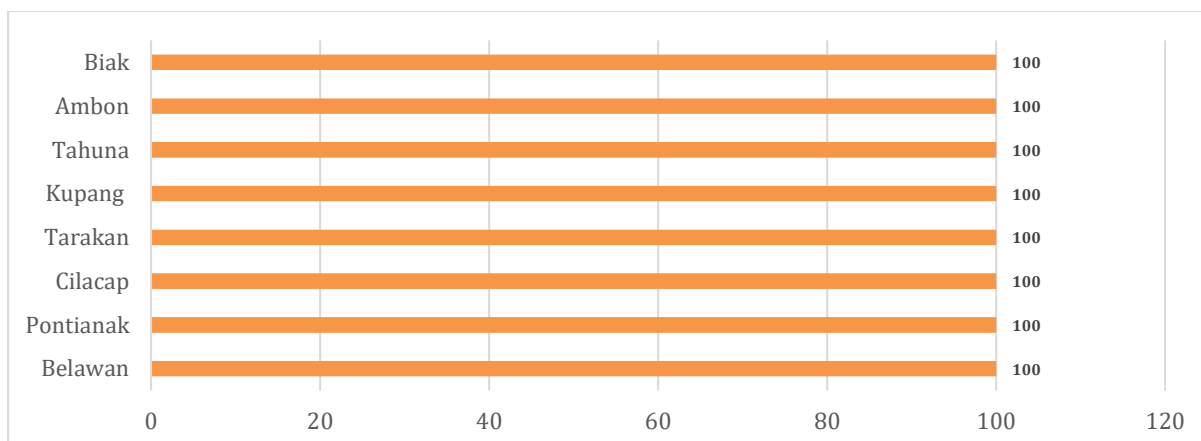
Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 51/ITJ.0/TU.140/II/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Triwulan IV Tahun 2024, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan IV Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 100.00% (tuntas 354 rekomendasi dari 354 rekomendasi).

Capaian indikator **Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan** pada tahun 2024 mencapai 100% atau sebesar 120% dari target yang telah ditentukan. Keberhasilan ini diperoleh karena Stasiun PSDKP Biak berhasil menindaklanjuti 10 rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal di lingkungan Ditjen PSDKP. Capaian ini mencerminkan komitmen dan efektivitas dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan serta menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap prosedur yang berlaku.

Tabel 36. Capaian IKM Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
16.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	%	80	75	80	100	75	100	-	-	120	100	120	-	-

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Biak setara dengan rata-rata capaian UPT lainnya, dengan nilai indeks rata-rata sebesar 100% dan capaian sebesar 100%. Perbandingan capaian pada indikator ini dapat dilihat pada Gambar 19.



Gambar 19. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Rekomendasi Hasil Pengawasan)

7. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Stasiun PSDKP Biak. Nilai ini diperoleh dari hasil pengukuran mandiri menggunakan LKE pelaksanaan program budaya kerja. Pada tahun 2024 berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Manajemen Transformasi Nomor 1080/PSDKP.1/TU.210/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 hal Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Pengelolaan Kinerja Tahun 2024 Tim Kerja Manajemen Transformasi, terdapat penyesuaian target indikator Nilai Implementasi Program Budaya Kerja semula 21 menjadi 70.

Indikator ini memiliki 12 (dua belas) unsur budaya kerja yang dinilai implementasinya, sebagai berikut:

- Tim Satker (bobot 5%)
- Hasilkan inovasi unit kerja (bobot 20%)
- Lima menit sebelum jadwal (bobot 5%)
- Ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin (bobot 8%)
- Upayakan data terkini (bobot 6%)
- Organisasikan, catat, aksi dan arsipkan (bobot 6%)
- Tegakan aturan dengan akuntabel dan transparan (bobot 10%)
- Belanja anggaran secara realistis, akuntabel, dan Amanah (bobot 10%)
- ASN PSDKP produktif kerja (bobot 6%)
- Menyelesaikan tugas dengan tepat (bobot 9%)
- Hargai, motivasi dan inisiatif (bobot 10%)
- Gelorakan Gerakan hemat energi (bobot 5%)

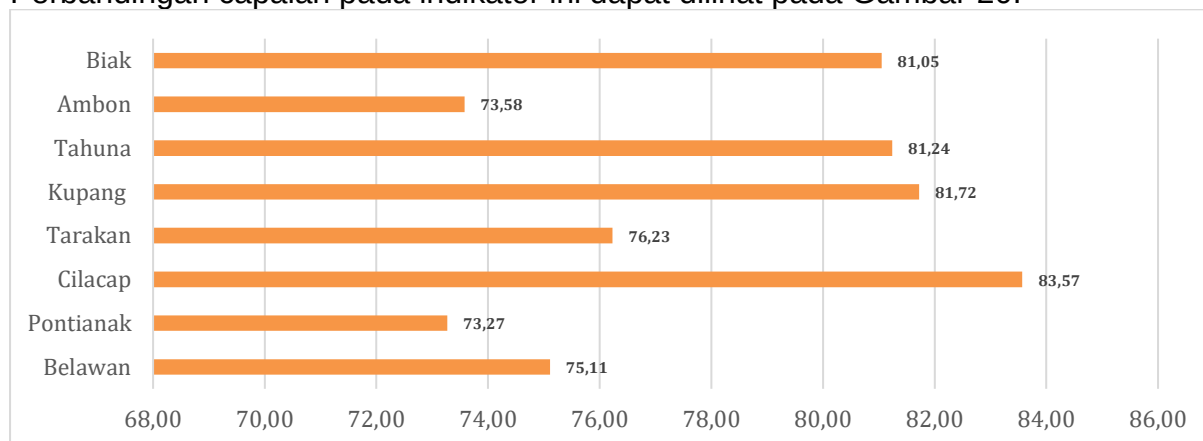
Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 81,05 atau 115,79% dari target yang telah ditetapkan. Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023 karena adanya perbedaan perhitungan bobot penilaian terhadap 12 (dua belas) unsur budaya kerja yang ada yang dinilai implementasinya. Selain itu, indikator ini tidak tertuang dalam dokumen Renstra 2020 – 2024, sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Keberhasilan indikator ini merupakan upaya tim Gugus Kerja Transformasi Stasiun PSDKP Biak dalam pelaksanaan monitoring rencana aksi

secara konsisten setiap bulan. Selain itu dilaksanakan sosialisasi dan implementasi secara internal guna penyadartahuan pentingnya budaya kerja.

Tabel 37. Capaian IKM Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
17.	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	Nilai	70	21	21	81,05	27,34	25,84	-	-	115,79	120	120	-	-

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Biak berada di atas rata-rata capaian UPT lainnya, dengan nilai rata-rata sebesar 78,22 dan capaian sebesar 81,05. Perbandingan capaian pada indikator ini dapat dilihat pada Gambar 20.



Gambar 20. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Implementasi Budaya Kerja)

8. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Biak

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai terobosan dalam jenis pelayanan publik yang dapat berupa gagasan atau ide kreatif yang orisinil dan/atau adaptasi atau modifikasi. Inovasi ini bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak selalu berupa penemuan baru, melainkan juga dapat mencakup pendekatan baru yang bersifat kontekstual, baik melalui perluasan maupun peningkatan kualitas dari inovasi pelayanan publik yang telah ada.

Terdapat kriteria inovasi yang dimaksud dalam indikator kinerja ini yaitu inovasi memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Capaian indikator kinerja ini pada akhir tahun 2024 ditargetkan berupa pencapaian satu inovasi yang dikeluarkan oleh Stasiun PSDKP Biak melalui proposal inovasi RADIO SEKANTOR (Rapat dan Dialog Seputar Kantor). Inovasi ini dikembangkan berdasarkan hasil analisis terhadap akar permasalahan komunikasi yang selama ini berlangsung secara berjenjang, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan langsung oleh pimpinan. RADIO SEKANTOR (Rapat dan Dialog Seputar Kantor) adalah sebuah inovasi dari Stasiun PSDKP Biak yang dirancang untuk meningkatkan komunikasi internal antara pimpinan dan pegawai. Inisiatif ini berfungsi sebagai forum rutin untuk membahas berbagai isu yang relevan dengan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan format seperti rapat dan dialog melalui *Daring* dan *Luring*, pegawai diberi kesempatan untuk

menyampaikan pandangan, masukan, saran, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta pencapaian yang telah diraih. Pimpinan secara cepat memperoleh informasi tersebut sehingga memudahkan pengambilan Keputusan. Inovasi RADIO SEKANTOR yang diusulkan oleh Stasiun PSDKP Biak berhasil mendapatkan nilai 74,85 dalam perlombaan inovasi pelayanan publik. Rekap nilai hasil perlombaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 16.

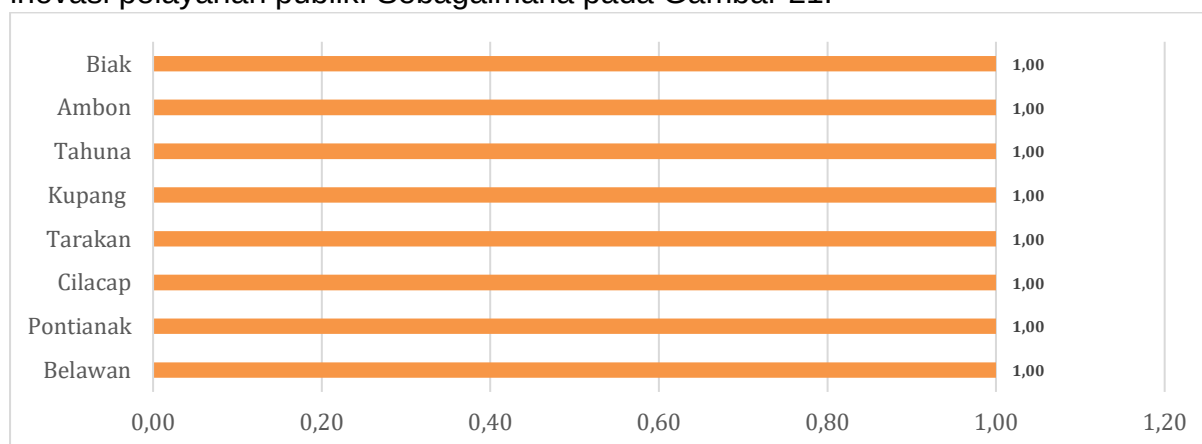
Tabel 16. Rekap Nilai Lomba Inovasi Tahun 2024

No.	Nama UPT/Unit	Nilai Rata-rata
1	Pangkalan PSDKP Lampulo	82,85
2	Stasiun PSDKP Cilacap	82,02
3	Pangkalan PSDKP Benoa	81,60
4	Stasiun PSDKP Tarakan	80,65
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80,35
6	Pangkalan PSDKP Bitung	79,45
7	Stasiun PSDKP Ambon	79,22
8	Stasiun PSDKP Tahuna	77,95
9	Pangkalan PSDKP Tual	77,83
10	Pangkalan PSDKP Jakarta	75,70
11	Pangkalan PSDKP Batam	75,10
12	Stasiun PSDKP Biak	74,85
13	Stasiun PSDKP Belawan	74,20
14	Stasiun PSDKP Kupang	73,78

Tabel 38. Capaian IKM Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Biak

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
18.	Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Biak (Inovasi)	Inovasi	1	1	1	1	1	1	-	-	100	100	100	-	-

Keberhasilan indikator ini merupakan upaya tim Gugus Kerja Transformasi Stasiun PSDKP Biak dalam menganalisis akar-akar permasalahan yang terjadi dan menciptakan satu inovasi yang bisa memudahkan suatu pekerjaan. Indikator inovasi pelayanan publik dipenuhi oleh seluruh UPT sekelas. Seluruh UPT memenuhi 1 inovasi pelayanan publik. Sebagaimana pada Gambar 21.



Gambar 21. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Inovasi)

9. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), adalah dengan menyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur tingkat kualitas pelayanan. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara diwajibkan untuk melakukan penilaian kinerja pelayanan publik secara berkala.

SKM adalah kegiatan pengukuran yang komprehensif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Biak. Sebagai salah satu otoritas yang berwenang menerbitkan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, Stasiun PSDKP Biak berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara optimal bagi seluruh pengguna layanan.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2024 dilakukan menggunakan aplikasi si SUSAN, yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN). Pengisian SKM di Stasiun PSDKP Biak dilakukan dengan membagikan tautan si SUSAN kepada pengguna layanan yang telah menerima pelayanan penerbitan SLO. Pada tahun 2024, terdapat 50 (lima puluh) responden yang telah mengisi survei SKM. Data hasil SKM kemudian terinput otomatis ke dalam aplikasi si SUSAN dan diolah menggunakan formula analisis di Microsoft Excel.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2024 terhadap pelayanan penerbitan SLO kapal perikanan mendapatkan predikat 'Sangat Baik', dengan NRR IKM sebesar 3,99 pada skala 1-4. Jika dikonversikan ke skala 100, nilai tersebut menjadi 99,63. Dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya, nilai SKM pada Triwulan III mengalami peningkatan signifikan sebesar 17,44 poin. Capaian tahun 2024 pada indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 karena terdapat perbedaan nomenkelatur pada indikator tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pada indikator ini seperti kemudahan akses layanan, kecepatan dan ketepatan pelayanan, sikap ramah dan profesionalisme petugas. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan publik dengan kualitas yang sangat tinggi.

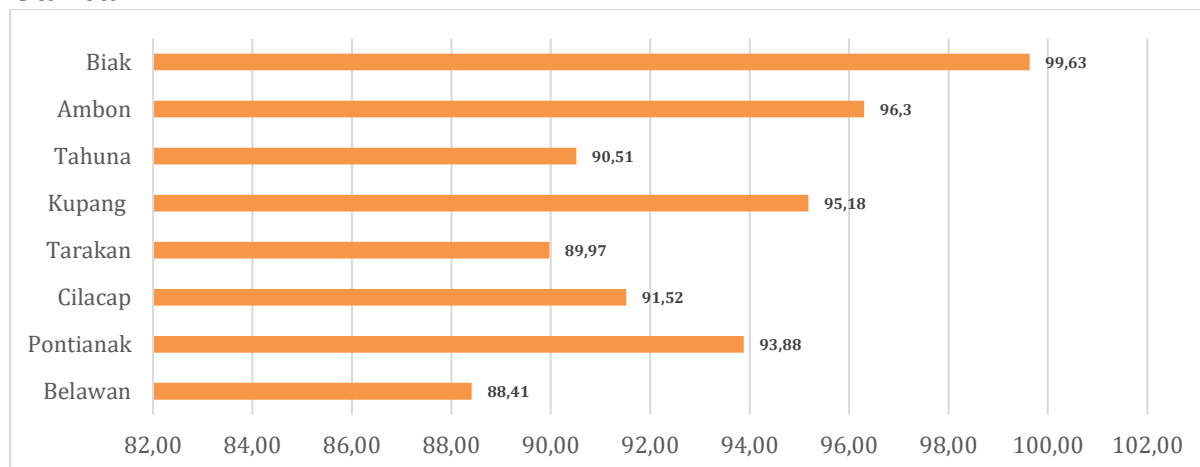
Tabel 39. Capaian IKM Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Biak

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
19.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak	Indeks	80	-	80	99,63	-	-	-	-	120	-	-	-	-

Pada tahun 2024, terdapat dua unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah, yaitu unsur "Kesesuaian Jangka Waktu Pelayanan" dan "Layanan Konsultasi Pengaduan". Stasiun PSDKP Biak telah menyusun rencana tindak lanjut untuk memperbaikinya yang akan ditindaklanjuti pada triwulan I di bulan Januari 2025.

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Biak berada di atas rata-rata, dengan nilai

rata-rata capaian UPT lain sebesar 93,18, sedangkan capaian Stasiun PSDKP Biak mencapai 99,63 indeks. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 22.



Gambar 22. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IKM)

10. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak

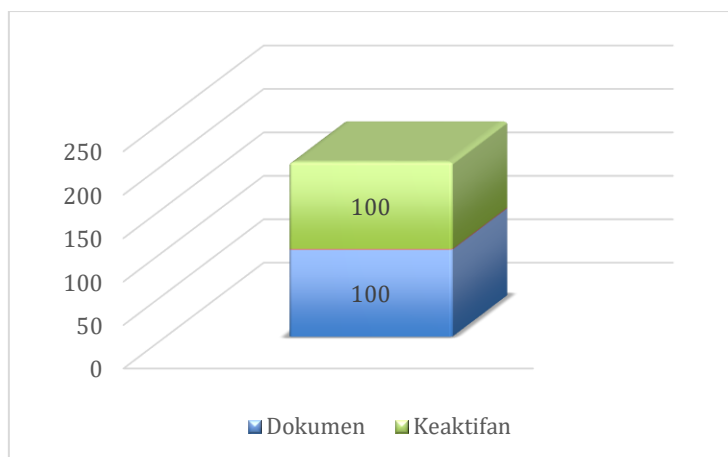
Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan Kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 2 komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur pada indikator kinerja ini, yaitu:

- Dokumen (20%): Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Rincian Target IKU, Laporan Kinerja & Interim, Renaksi Kinerja;
- Keaktifan (80%): Kepala Stasiun dan Ketua Tim Kerja. Perhitungan keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu waktu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Pembobotan yang dimaksud antara lain:

- Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminisasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5;
- Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan poin 1;
- Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3;

Capaian rata-rata indikator kinerja hingga tahun 2024 adalah 132,50, atau sebesar 120,00% dari target yang telah ditetapkan. Keaktifan Kepala Stasiun dan Ketua Tim Kerja Stasiun PSDKP Biak dalam aplikasi Collaboration Office (COOFIS) sangat memuaskan, karena evaluasi reguler dilakukan terhadap postingan bulanan Stasiun PSDKP Biak di aplikasi COOFIS. Rincian capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada Gambar 23.

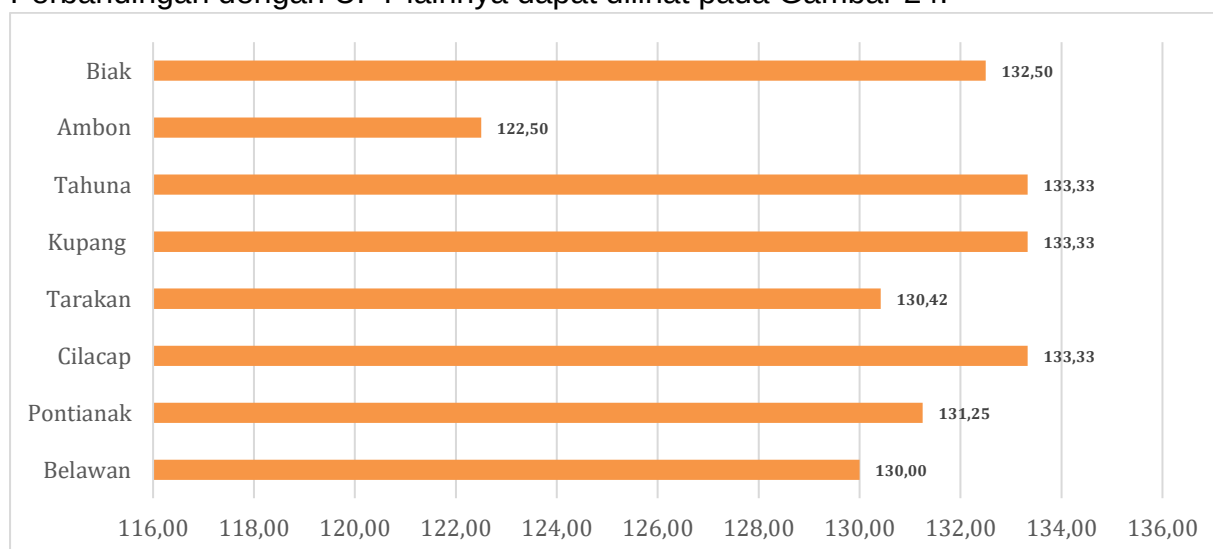


Gambar 23. Capaian per komponen penilaian IK Manajemen Pengetahuan

Tabel 40. Capaian IKM Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Biak

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
20.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	%	94	92	94	132,50	100	100	100	53,33	120	108,7	116,28	119,05	65,04

Capaian manajemen pengetahuan pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023. Target indikator ini tertuang dalam renstra 2020 – 2024 sebesar 84%. Lebih rendah 10% dibawah target tahun 2024. Jika dibandingkan dengan UPT sekelas lainnya, Stasiun PSDKP Biak memiliki capaian di atas rata-rata dibandingkan dengan satker selevel, dengan rata-rata sebesar 130,83, sedangkan capaian Stasiun PSDKP Biak sebesar 132,50. Perbandingan dengan UPT lainnya dapat dilihat pada Gambar 24.



Gambar 24. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MP)

11. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup unit kerja yang telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh inspektorat jenderal pada 18 s.d 22 November 2023. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Stasiun PSDKP Biak diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (Bobot 12,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (Bobot 25%)
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (Bobot 25%)
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian Bobot (25%)
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (Bobot 12,5%)

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini di akhir tahun 2024 adalah 80,00% dan telah tercapai dengan 100,00%, telah melebihi dari nilai target sebesar 120%. Detail capaian indikator kinerja ini sebagaimana pada Tabel 41.

Tabel 41. Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak(%)	%	80	77,5	80	100	100	100	95	-	120	120	120	120	-

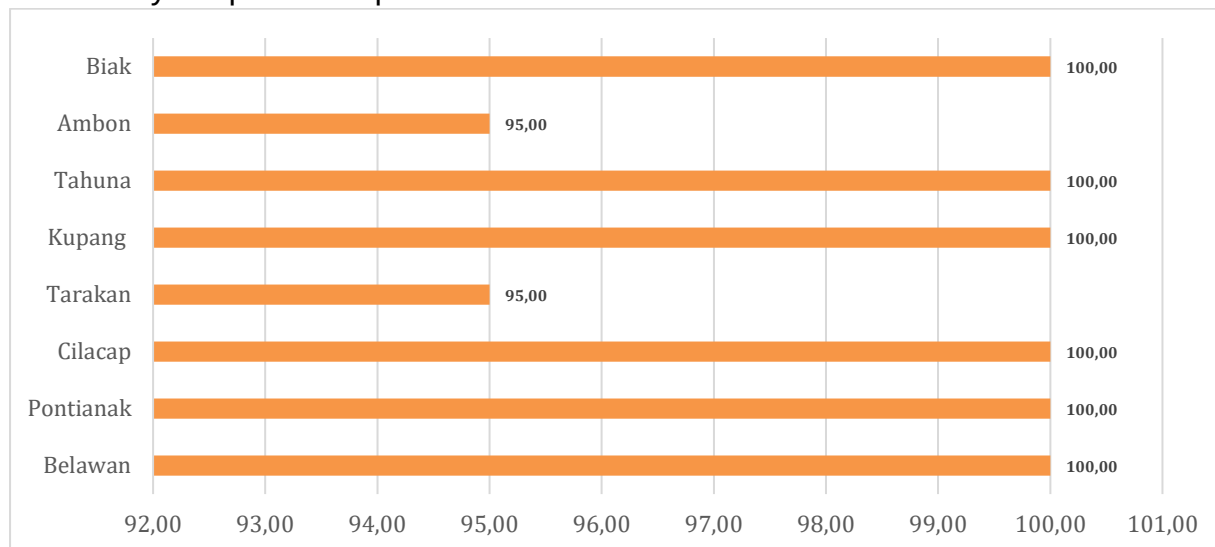
Terdapat beberapa unsur yang telah dipenuhi dalam pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (dengan nilai 12,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (dengan nilai 25%)
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (dengan nilai 25%)
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (dengan nilai 25%)
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (dengan nilai 12,5%)

Tabel 17. Nilai Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Biak

Keterangan	Aspek Penilaian				
	RKBMN 2024	PSP BMN	Revaluasi Aset	Penggunaan BMN	Taat Pelaporan
Bobot	12,5%	25%	25%	25%	12,5%
Nilai yang diperoleh	12,5%	25%	25%	25%	12,5%
Total Skor	100%				

Target indikator kepatuhan pengelolaan BMN tahun 2023 lebih tinggi 7,5 Nilai dari target jangka menengah. Capaian ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2020-2024, sebagaimana pada Tabel 15. Jika dibandingkan dengan UPT sekelas lainnya, Stasiun PSDKP Biak memiliki capaian di atas rata-rata UPT selevel, dengan rata-rata sebesar 98,75, sedangkan capaian Stasiun PSDKP Biak sebesar 100,00. Perbandingan dengan UPT lainnya dapat dilihat pada Gambar 24.



Gambar 24. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Pengelolaan BMN)

Capaian indikator ini merupakan upaya Stasiun PSDKP Biak dalam memenuhi seluruh komponen penilaian kepatuhan pengelolaan BMN. Beberapa upaya Stasiun PSDKP Biak dalam mengoptimalkan penilaian kepatuhan pengelolaan BMN yaitu:

1. Stasiun PSDKP Biak telah menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2024 pada tahun 2022. RKBMN tersebut telah digunakan dalam penyusunan kebutuhan anggaran tahun 2024.
2. Seluruh BMN yang diperoleh sampai dengan triwulan III tahun 2024 telah diusulkan penetapan Status penggunaannya kepada unit eselon I.
3. Seluruh BMN dengan kondisi rusak berat telah dilakukan penghapusan dan usulan penghapusan.
4. Aset BMN yang diperoleh pada tahun 2023 seluruhnya telah dimanfaatkan dengan dilengkapi BAST/berita acara pemakaian

12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/ Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh inspektorat jenderal pada 18 s.d 22 November 2023. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Stasiun PSDKP Biak (Bobot 10%)
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (Bobot 15%)

3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (Bobot 10%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (Bobot 45%)
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (Bobot 5%)
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup UPT TW I s.d TW III 2024 (Bobot 15%)

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini pada akhir tahun 2024 adalah 80,00 dan telah tercapai 88,75 atau 110,94 % dari target. (dapat dilihat pada Tabel 42).

Tabel 42. Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
22.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	%	80	77,5	80	88,75	98,75	100	93,3	-	110,94	120	120	120	-

Terdapat beberapa unsur yang telah dipenuhi dalam pengadaan barang dan jasa lingkup lingkup Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Stasiun PSDKP Biak (Nilai 10%)
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (Nilai 15%)
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (Nilai 10%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (Nilai 33,75%)
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (Nilai 5%)
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup UPT TW I s.d TW III 2024 (Nilai 15%)

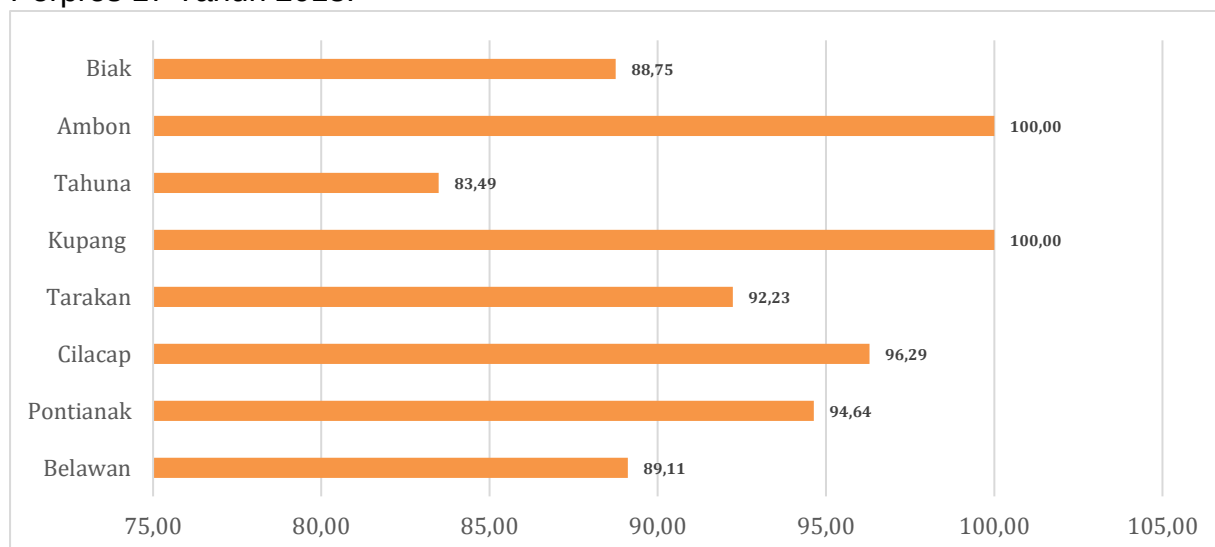
Tabel 18. Nilai PBJ lingkup Stasiun PSDKP Biak

Keterangan	Aspek Penilaian					
	MR	Perencanaan dan Persiapan	Persentase Pemilihan	Kesesuaian Tahapan	Laporan	Persentase TL
Bobot	10%	15%	10%	45%	5%	15%
Nilai yang diperoleh	10%	15%	10%	33,75%	5%	15%
Total Skor	88,75%					

Capaian indikator ini pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebelumnya sebesar 10%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang pada renstra 2020-2024, capaian indikator ini berada jauh diatas target jangka menengah. Detail indikator ini sebagaimana pada Tabel 42.

Jika dibandingkan dengan UPT sekelas lainnya, Stasiun PSDKP Biak memiliki capaian di bawah rata-rata, dengan rata-rata sebesar 93,06, sedangkan capaian Stasiun PSDKP Biak sebesar 88,75. Perbandingan dengan UPT lainnya dapat dilihat pada Gambar 25. Penurunan nilai ini disebabkan oleh realisasi kontraktual yang baru terlaksana pada triwulan IV. Selain itu realisasi belanja modal yang direncanakan pada semester pertama baru bisa terealisasi 100% pada

semester kedua. Keterlambatan realisasi kontrak disebabkan oleh rencana pengadaan yang tidak dimatangkan saat pra DIPA dan sulitnya menemukan penyedia yang memenuhi kualifikasi dengan tetap mengakomodir ketentuan dalam Perpres 17 Tahun 2018.



Gambar 24. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Pengelolaan PBJ)

13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Biak

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pada Kementerian/Lembaga dan satuan unit kerja. IKPA bertujuan memastikan bahwa anggaran yang telah disusun dan disetujui dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, meliputi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Stasiun PSDKP Biak memiliki target nilai IKPA sebesar 92,00 pada Tahun 2024.

Kategori capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4, antara lain:

- Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
- Baik, apabila $85 \leq \text{nilai IKPA} < 95$
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Indikator ini adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan 8 indikator pelaksanaan anggaran, sebagai berikut:

- Revisi DIPA;
- Deviasi hal III DIPA;
- Penyerapan anggaran;
- Belanja kontraktual;
- Penyelesaian tagihan;
- Pengelolaan UP dan TUP;

- Dispensasi SPM; dan
- Capaian output.

Pada tahun 2024, nilai IKPA lingkup Stasiun PSDKP Biak adalah 95,49 atau sebesar 101,85 dari target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja pelaksana anggaran pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,76 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada jangka menengah ditargetkan sebesar 89 Nilai. Menunjukkan capaian tahun 2024 melampaui target jangka menengah (lihat Tabel 43).

Tabel 43. Capaian IKM Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Biak

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
23.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	Nilai	93,76	93,75	93,76	95,49	94,73	96,68	91,85	88,78	101,85	101,05	108,63	103,2	100,9

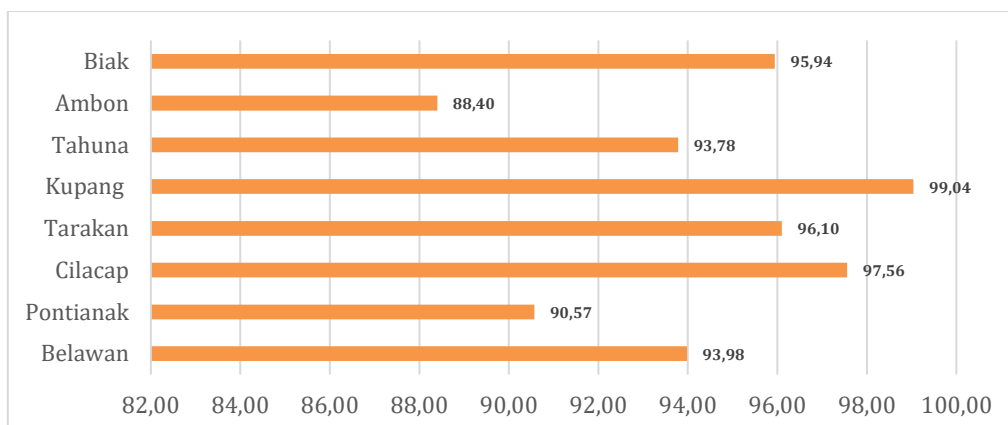
Capaian ini merupakan hasil dari konsistensi pengelolaan keuangan Stasiun PSDKP Biak dalam mematuhi kaidah-kaidah penganggaran dan belanja yang diatur dalam peraturan meteri keuangan. Nilai tiap Komponen indikator pelaksanaan anggaran Stasiun PSDKP Biak dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 3. Indikator Pelaksanaan Anggaran Stasiun PSDKP Biak

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100.00	87.60	90.07	94.00	100.00	99.35	100.00	95.49	100%	0.00	95.49
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10.00	13.14	18.01	9.40	10.00	9.94	25.00				
Nilai Aspek	93.80		95.86				100.00				

Berdasarkan data di atas, terdapat dua komponen yang menjadi faktor pengurang cukup signifikan yaitu komponen deviasi halaman tiga DIPA dan komponen penyerapan anggaran. Tingginya deviasi halaman tiga DIPA Stasiun PSDKP Biak disebabkan pelaksanaan kegiatan operasional kapal pengawas sebagai kegiatan dengan alokasi anggaran terbesar tidak sesuai rencana akibat kerusakan dan cuaca ekstrim. Komponen penyerapan anggaran juga tidak ternilai optimal disebabkan adanya kebijakan nasional berupa blokir *automatic adjustment* dan blokir belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 1.179.283.000,- pada DIPA Stasiun PSDKP Biak.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan UPT sekelas lainnya, Stasiun PSDKP Biak memiliki capaian di atas rata-rata, dengan rata-rata sebesar 94,42, sedangkan capaian Stasiun PSDKP Biak sebesar 95,94. Perbandingan dengan UPT lainnya dapat dilihat pada Gambar 25.



Gambar 25. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Capaian IKPA)

14. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Indikator kinerja ini sebelumnya berbunyi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) kemudian nomenklaturnya berubah menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dan perubahan target pada Renstra Unit Organisasi Eselon I dan Perjanjian Kinerja menjadi 82 (Level Kementerian), 81 (Level I) dan 71 (Level Satker), berdasarkan Nota Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 2526/SJ.1/RC.610/IX/2024 pada tanggal 26 September 2024.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan indikator penting yang mencerminkan efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan, pengelolaan, dan realisasi anggaran lingkup Stasiun PSDKP Biak. NKPA dinilai berdasarkan kesesuaian anggaran dengan program prioritas, efisiensi dan akurasi pengelolaan kepatuhan terhadap peraturan, serta transparansi dalam pelaksanaan. Dalam mendukung pencapaian NKPA yang optimal, aplikasi Monev Kemenkeu berperan sebagai alat untuk pemantauan kinerja anggaran. Dengan memanfaatkan Monev Kemenkeu, Stasiun PSDKP Biak dapat memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Capaian indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Stasiun PSDKP Biak tahun 2024 sebesar 96,18 atau sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan. Indikator NKPA tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 disebabkan terdapat perbedaan nomenkelatur dan perhitungannya. Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah. Detail indikator ini sebagaimana pada Tabel 44.

Tabel 44. Capaian IKM Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi					Capaian				
			2024	2023	Renstra	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
24.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	Nilai	71	-	-	96,18	-	-	-	-	120	-	-	-	-

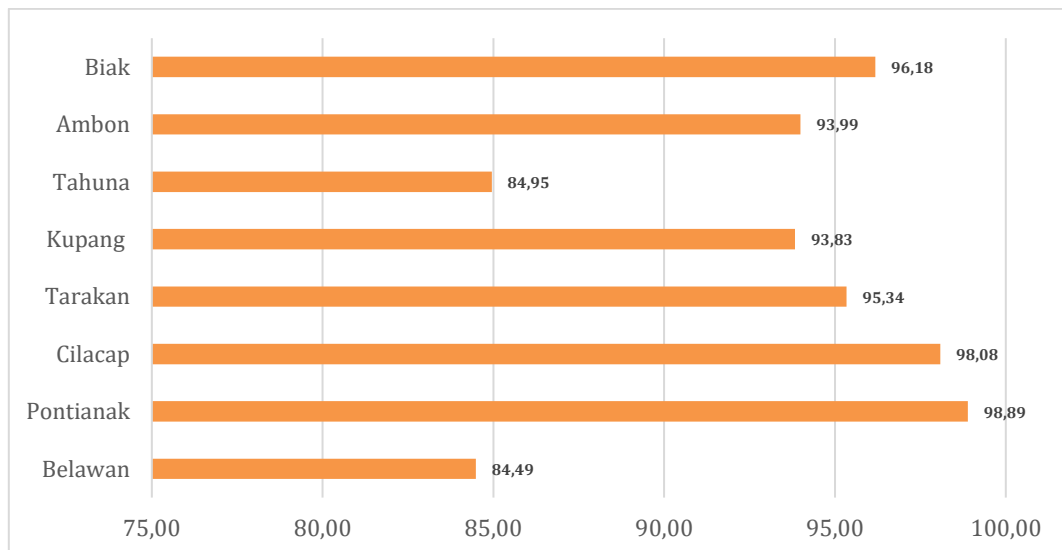
Nilai ini diperoleh dari hasil pengolahan data pada Aplikasi Monev Kemenkeu Kementerian Keuangan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 26.

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	250263	STASIUN PSDKP BIAK	96,18	100,00	100,00	74,50

Gambar 26. NKPA Stasiun PSDKP Biak

Capaian nilai kinerja perencanaan anggaran ini merupakan sumbangsih dari optimalnya capaian target output DIPA Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024. Selain itu dalam penyusunan dokumen anggaran, Stasiun PSDKP Biak juga menggunakan standar biaya keluaran yang ditetapkan oleh kementerian keuangan. Meskipun demikian efisiensi SBK masih perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya.

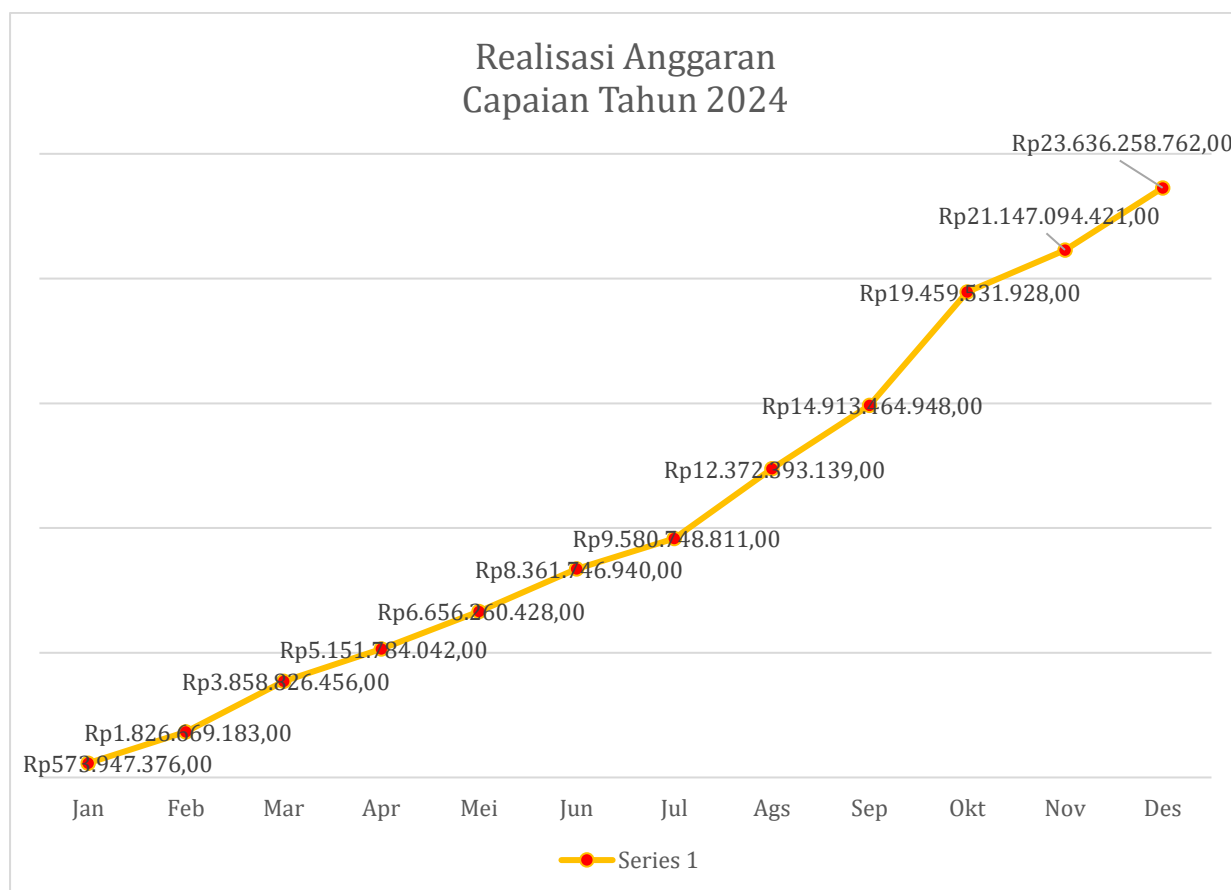
Capaian indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan UPT sekelas lainnya, Stasiun PSDKP Biak memiliki capaian di atas rata-rata, dengan rata-rata sebesar 93,22, sedangkan capaian Stasiun PSDKP Biak sebesar 96,18. Perbandingan dengan UPT lainnya dapat dilihat pada Gambar 27.



Gambar 27. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Capaian NKPA)

3.8 Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2024 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Nomor: SP DIPA-032.05.2.250263/2024 tanggal 24 November 2023 adalah sebesar Rp24.894.597.000 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Sampai dengan akhir tahun 2024, DIPA telah mengalami 15 (lima belas) kali revisi, dengan revisi terakhir pada tanggal 20 Desember 2024 dan pagu anggaran tetap sebesar Rp24.820.597.000 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun PSDKP Biak pada 2024 adalah 95,22% atau sebesar Rp23.636.258.762 (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Rincian serapan anggaran dari Januari hingga akhir Juni 2024 dapat dilihat pada Gambar 28.



Gambar 28. Kurva Realisasi Anggaran Bulan Januari s/d Desember 2024

Kegiatan yang paling mempengaruhi serapan anggaran pada periode Januari hingga Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan

- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP.

Capaian anggaran pada akhir tahun 2023 mencapai 95,22% dari alokasi anggaran dan 99,98% dari pagu efektif. Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 45.

Tabel 45. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan	Pagu Revisi (Rp.)	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran (Rp.)	Pagu Revisi (%)	Pagu Efektif (%)	Sisa Anggaran
Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	11.663.978.000	10.676.236.000	10.675.690.779	91,52	99,99	545.221
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	284.500.000	274.963.000	274.870.992	96,61	99,97	92.008
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	654.500.000	578.159.000	577.784.418	88,27	99,94	374.582
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	350.000.000	335.378.000	335.247.470	95,78	99,96	130.530
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	11.867.619.000	11.776.578.000	11.772.665.103	99,19	99,97	3.912.897
Total	24.820.597.000	23.641.314.000	23.636.258.762	95,22	99,98	5.055.238

3.9 Efisiensi

Untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder*, Stasiun PSDKP Biak telah melakukan upaya maksimal dalam penggunaan sumber daya. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran terhadap penjumlahan perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi Monev Kemenkeu, nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 96,18. Capaian nilai ini didukung oleh 1) Penggunaan SBK memperoleh nilai 100; 2) Capaian Realisasi Output mendapatkan nilai 100; dan 3) Efisiensi SBK dengan nilai sebesar 74,5.

Selain efisiensi penggunaan anggaran, pencapaian indikator kinerja Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2024 juga dipengaruhi oleh penggunaan beberapa sumber daya lainnya, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Google Drive

Google Drive adalah layanan penyimpanan online (cloud) yang memudahkan pengguna untuk menyimpan file melalui internet. Selama periode 2022 hingga 2024, Stasiun PSDKP Biak masih menggunakan Google Drive untuk penyimpanan data kinerja. Penggunaan Google Drive ini merupakan implementasi dari prinsip satu data di lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Dengan adanya penyimpanan online, pembaruan data menjadi lebih mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sebagai bentuk pengendalian data dan informasi kinerja, akses ke penyimpanan hanya diberikan kepada tim manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak.

2. Pemanfaatan aplikasi ZOOM

Pemanfaatan aplikasi ZOOM dalam kegiatan rapat memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam komunikasi serta kolaborasi antar peserta. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan beragam, ZOOM mampu mendukung berbagai kebutuhan rapat, mulai dari diskusi kecil hingga seminar berskala besar. Penggunaan ZOOM juga membantu menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan perjalanan dan akomodasi, terutama dalam konteks pertemuan jarak jauh.

3. Pelaporan kegiatan *realtime* via WA Group

Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan untuk mengukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan, dapat diketahui juga isu-isu terkini yang sedang berkembang di lapangan, sehingga dapat segera dimonitor. Oleh karena itu, pelaporan kegiatan secara real-time melalui grup WhatsApp memberikan ringkasan informasi terbaru kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.

4. Forum komunikasi bersama Stakeholder via WA Group

Komunikasi dengan stakeholder terkait merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi eksternal yang berkaitan dengan aktivitas perikanan di wilayah perairan WPP-717. Melalui komunikasi ini, diharapkan berbagai isu dapat dikembangkan dan banyak sumbang saran dari partisipasi anggota grup dapat diperoleh.

5. Belanja *online shop*

Sebagai upaya untuk mempersingkat waktu belanja dengan berbagai pilihan barang dan variasi harga, belanja secara online dilakukan. Belanja ini hanya diperuntukkan bagi barang-barang kecil yang tidak memerlukan pengecekan fisik. Belanja online dapat dilakukan di mana saja dan dari mana saja dengan metode yang lebih sederhana, semua itu dapat diakses melalui ponsel. Melalui belanja online, efisiensi penggunaan anggaran dapat meningkat karena banyak toko atau e-commerce menawarkan promosi seperti potongan harga, gratis ongkir, dan voucher belanja, sehingga harga menjadi lebih murah.



PENUTUP

VI. Penutup

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024 menyajikan capaian sasaran Stasiun PSDKP Biak untuk periode Januari hingga September 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM);
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Biak berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen PSDKP, Renstra Stasiun PSDKP Biak, serta kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Biak (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2024 diukur menggunakan aplikasi Kinerjaku dengan nilai capaian 103,82% dan kategori "**Baik**";
4. Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai sesuai dengan fungsi masing-masing jabatan.

4.2 Rekomendasi

1. Tim Kerja di masing-masing bagian agar menyampaikan hasil perhitungan capaian kinerja tahun 2024 kepada PSDP, PSDK, PP, dan POA secara tepat waktu;
2. Menindaklanjuti rekomendasi SKM Triwulan IV 2024 pada bulan Januari tahun 2025 terhadap nilai unsur yang terendah.
3. Gelar operasi Speedboat pengawas akan dilengkapi berdasarkan peta kerawanan atau pengaduan masyarakat dan kondisi cuaca dari BMKG atau sumber lainnya.



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2024**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Erwin
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Biak

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Adin Nurawaluddin
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Biak

Mochamad Erwin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif	01	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	91
		02	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91
		03	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK.2	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan	04	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Diselesaikan (%)	100
		05	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)	100
SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	06	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	100
SK.4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	07	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	100
SK.5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan Yang Tuntas	08	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
		09	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
SK.6	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas	10	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK.7	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	11	Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP (Nilai)	75
		12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	100
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	70

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET
		14 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	82
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	84
		16 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		17 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21
		18 Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Biak (Inovasi)	1
		19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	80
		20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	94
		21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	80
		22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	80
		23 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	93,76
		24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	82

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	11.663.978.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	284.500.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	654.500.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	350.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11.941.619.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024		24.894.597.000

Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak



Mochamad Erwin

Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2024**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.dipsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Erwin
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Biak, 30 Desember 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

Pung Nugroho Saksono

Mochamad Erwin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif	01	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	91
		02	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91
		03	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK.2	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan	04	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Diselesaikan (%)	100
		05	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)	100
SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	06	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	100
SK.4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	07	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	100
SK.5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan Yang Tuntas	08	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
		09	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
SK.6	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas	10	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK.7	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	11	Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP (Nilai)	75
		12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	100
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	70

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET
		14 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	82
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	84
		16 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		17 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70
		18 Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Biak (Inovasi)	1
		19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	80
		20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	94
		21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	80
		22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	80
		23 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	93,76
		24 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	71

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	11.663.978.000
2.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	654.500.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	350.000.000
4.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	284.500.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11.867.619.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024		24.820.597.000

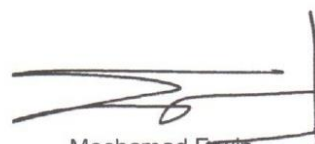
Biak, 30 Desember 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak



Pung Nugroho Saksono



Mochamad Erwin

Penghargaan yang telah diperoleh Tahun 2024

Pelaporan Keuangan

1. Kantor Kemenag Kab. Supiori
2. Stasiun PSDKP
3. Kantor UPBU Numfor

Penggunaan CMS

1. KPU Biak Numfor
2. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak
3. RRI Biak

Penggunaan KKP

1. Stasiun PSDKP
2. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua
3. Stasiun Meteorologi Frans Kaisiepo









KKP

TRANSAKSI TERBANYAK I SEMESTER I TAHUN 2024

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

DIBERIKAN KEPADA:

STASIUN PSDKP BIAK BIAK (250263)

Biak, 12 Agustus 2024



SUHARTONO
NIP 197412091994021001